



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



BSPJI AMBON
Balai Standardisasi dan Pelayanan
Jasa Industri Ambon

PERIODE TAHUN ANGGARAN 2025

LAKIN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI AMBON**



**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON
Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas
PO BOX 1136, Ambon 97128

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon TA 2025. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Ambon atas penggunaan anggaran tahun 2025. Selain itu, Penyusunan Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BSPJI Ambon disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja BSPJI Ambon.

Semoga melalui laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas capaian kinerja BSPJI Ambon kepada para pemangku kepentingan.

Ambon, 22 Januari 2026

Kepala Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri Ambon

Mamang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon (BSPJI Ambon) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian, maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon sebagai salah satu unit Eselon II memiliki Visi sesuai dengan Visi BSKJI yaitu **"Menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing"**. Visi BSPJI Ambon tersebut telah dituangkan dalam Misi, Tujuan, dan Sasaran BSPJI Ambon.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tahun 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang dilakukan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon telah dituangkan dalam Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tahun 2025-2029. Dengan harapan dapat mewujudkan industri yang unggul dan berbasis kompetensi inti daerah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon adalah "Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri " dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

Sasaran :

- Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional
- Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri
- Terwujudnya SDM yang Profesional
- Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik
- Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- Terwujudnya Akuntabilitas organisasi
- Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

Secara umum BSPJI Ambon telah berhasil mencapai target yang di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Rincian capaian atas target kinerja BSPJI Ambon tahun 2025 disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja BSPJI Ambon tahun 2025.

Tabel 1 Target dan Capaian Kinerja BSPJI Ambon TA 2025

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Fisik	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,63	3,81	104,96%	100%
		2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/ Instansi	100	349	349,00%	100%
SK6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	Persen	80	93,67	117,09%	100%
		2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	Nilai	40	76,56	191,40%	100%
SK6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2	5	250,00%	100%
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	179	808	451,40%	100%
		3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	Persen	0,02	0,039	195,00%	100%
SK6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,3	74,93	92,16%	100%
SK6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20	14,29	71,45%	100%
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77	44,545	57,85%	100%
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,6	4,24	117,78%	100%
SK6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	60	100	166,67%	100%
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	70,1	72,1	102,85%	100%
SK6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,5	82,1	103,27%	100%
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94	88,03	93,65%	100%
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75	94,25	125,67%	100%
SK6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang	Persen	75	89,52	119,36%	100%

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Fisik
		dan/atau jasa pemerintah					

Dalam Tahun Anggaran 2025, Penyerapan anggaran Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon pada tahun 2025 adalah sebesar 99,84% persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. Rp9.358.210.000,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sepuluh rupiah). Jumlah penerimaan anggaran PNBP BSPJI Ambon tahun 2025 adalah sebesar Rp1.248.776.737 (satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluuh Enam Ribuh Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau dengan realisasi sebesar 250%. dari target yang baseline target tahun Rp621.000.000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
BAB 1	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi.....	10
1.2 Peran Strategis Organisasi.....	11
1.3 Struktur Organisasi.....	17
BAB II	20
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	20
2.2 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	30
2.3 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
BAB III	45
AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Analisis Capaian Kinerja.....	45
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2024.....	51
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan pada Perjanjian Kinerja TA. 2025	67
3.1.3 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja TA. 2025	72
3.1.4 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (2025-2029)	102
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	106
3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM).....	110
3.2.2 Realisasi Anggaran Keuangan PNBPN/BLU	111
3.3 Analisis Sumber Efisiensi Sumber Daya Secara Umum	112
3.3.1 Analisis Efisiensi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja	112
3.3.2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA....	118
BAB IV	123
PENUTUP	123
4.1 Kesimpulan.....	123
4.2 Permasalahan dan Kendala	123
4.3 Saran Dan Rekomendasi.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BSPJI Ambon	18
Gambar 2. 1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	21
Gambar 2. 2 Tahapan Transformasi Ekonomi.....	22
Gambar 2. 3 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045.....	24
Gambar 3. 1 Sertifikat Akreditasi LPH BSPJI Ambon	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Capaian Kinerja BSPJI Ambon TA 2025	4
Tabel 1. 1 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Berdasar Jenis Industrinya.....	11
Tabel 1. 2 Jumlah Industri Besar Sedang Berdasar Jenis Industrinya.....	12
Tabel 1. 3 Jumlah Industri Besar dan Sedang Wlayah Papua	13
Tabel 1. 4 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Wlayah Papua.....	13
Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Golongan	18
Tabel 1. 6 Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	19
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029.....	26
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon 2025-2029.....	26
Tabel 2. 3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon 2025-2029	29
Tabel 2. 4 Komposisi Anggaran Kegiatan BSPJI Ambon Tahun 2025.....	30
Tabel 2. 5 Komposisi Anggaran Kegiatan Berdasarkan Jenis Belanja.....	31
Tabel 2. 6 Rincian Revisi DIPA BSPJI Ambon TA 2025	32
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja BSPJI Ambon Tahun 2025	33
Tabel 2. 8 Tabel Rencana Aksi BSPJI Ambon TA 2025	35
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 dan Renstra 2021-2024	48
Tabel 3. 2 Tujuan dan Indikator Kinerja	51
Tabel 3. 3 Matriks Alur IKU BSKJI sampai Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun 2025	55
Tabel 3. 4 Realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi 2025	65
Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja Utama	67
Tabel 3. 6 Tabel Pelanggan BSPJI Ambon.....	70
Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.1	72
Tabel 3. 8 Pencapaian SLA per triwulan	73
Tabel 3. 9 Pecapaian Nilai NPS per triwulan.....	75
Tabel 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.2	76
Tabel 3. 11 Indeks peningkatan PNBPN	77
Tabel 3. 12 Rincian Penerimaan PNBPN TA 2025 per Jenis Layanan	77
Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri TA 2021-2025	78
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri TA 2021-2025	82
Tabel 3. 15 Tabel Uraian Nilai Aset dan PNBPN tahun 2025	84
Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.3	85
Tabel 3. 17 Perbandingan Nilai Realisasi dengan Nilai Maksimal	86
Tabel 3. 18 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.4	87
Tabel 3. 19 Hasil Penilaian Indeks Layanan Publik BSPJI Ambon Tahun 2025	89
Tabel 3. 20 Kategori Nilai Pelayanan Publik	90
Tabel 3. 21 Perbandingan nilai indeks layanan publik oleh satker 2021-2025	90
Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.5	92
Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.6	96
Tabel 3. 24 Rincian Penilaian terhadap komponen pekerjaan	96
Tabel 3. 25 Perbandingan nilai minimal akuntabilitas kinerja oleh satker 2021-2025.....	97
Tabel 3. 26 IKPA BSPJI Ambon TA 2025	98
Tabel 3. 27 Perbandingan nilai minimal laporan Keuangan 2021-2025	100

Tabel 3. 28 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.7	101
Tabel 3. 29 Perbandingan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa 2021-2025	102
Tabel 3. 30 Capaian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029	104
Tabel 3. 31 Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	106
Tabel 3. 32 Rincian Revisi DIPA BSPJI Ambon TA 2025	106
Tabel 3. 33 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran dari Tahun 2019-2025	107
Tabel 3. 34 Realisasi Keuangan BSPJI Ambon TA 2025	108
Tabel 3. 35 Realisasi Keuangan Rupiah Murni Berdasarkan Jenis Belanja	110
Tabel 3. 36 Rincian Realisasi Keuangan PNBK BSPJI Ambon	111
Tabel 3. 37 Tabel Efisiensi Anggaran	113

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Kementerian Perindustrian memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Dalam konteks ini, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Perindustrian, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara merata di seluruh penjuru tanah air. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah menjadi instrumen utama BSKJI dalam memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada pelaku industri di tingkat daerah maupun nasional. Layanan yang diberikan oleh UPT mencakup berbagai aspek pengembangan teknologi industri, meliputi bidang bahan baku, bahan penolong, proses produksi, peralatan dan mesin industri, hingga produk akhir, termasuk upaya penanggulangan pencemaran industri. Selain itu, UPT juga berperan dalam menyusun program pengembangan kompetensi, merumuskan dan menerapkan standar, serta melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi dalam lingkup teknis tersebut. Tidak hanya itu, fungsi UPT juga mencakup aspek hilirisasi melalui kegiatan pemasaran, kerja sama, promosi, pelayanan informasi, penyebaran hasil litbang, serta pendayagunaan hasil pengembangan teknologi industri.

Pelaksanaan fungsi-fungsi strategis tersebut selama ini telah dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis berupa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). Kedua jenis UPT ini berperan penting dalam mendukung pembangunan industri berbasis wilayah melalui pendekatan teknis, inovatif, dan kolaboratif, serta menjadi simpul penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi teknis di tingkat daerah. Dengan demikian, keberadaan UPT di lingkungan BSKJI menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga 2024, terdapat 11 (sebelas) BBSPJI dan 13 (tiga belas) BSPJI yang terdiri sebagai berikut

:

- a) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan;
- b) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro;
- c) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam;
- d) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
- e) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik;
- f) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa;
- g) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin;
- h) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;
- i) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik;
- j) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri;

- k) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim;
- l) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

Sebagai catatan, BSPJI lebih difokuskan kepada pemberian layanan jasa industri berdasarkan potensi sumber daya daerahnya. Ke depannya setiap Satker BSPJI dapat memberikan layanan yang seragam di setiap daerah dan dapat memenuhi kebutuhan layanan jasa industri sesuai dengan ciri khas daerahnya

1.2 Peran Strategis Organisasi

Peranan Industri menempati peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola sektor perindustrian sebagai fondasi utama penggerak ekonomi nasional.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki area wilayah kerja Provinsi Maluku dan Pulau Papua. Sektor industri di Provinsi Maluku dan Pulau Papua merupakan salah satu motor penggerak perekonomian daerah yang berperan dalam menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri di daerah ini terdiri atas berbagai skala usaha, mulai dari industri mikro, kecil, menengah, hingga besar, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam membangun struktur perekonomian yang berdaya saing.

Industri di Maluku bergantung pada komoditas perikanan dan rempah-rempah seperti pala. Sektor perikanan utamanya berfokus pada industri pengolahan dan pembekuan ikan, sementara industri pengolahan rempah menghasilkan produk seperti minyak pala. Selain itu, ada juga pengembangan potensi kelapa, sagu, dan kakao sebagai komoditas unggulan.

Hasil Survei Industri Mikro dan Kecil yang dilaksanakan pada Tahun 2023 (VIMK23) di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa perusahaan/usaha IMK ada sebanyak 61.507 usaha adapun bidang industrinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Berdasar Jenis Industrinya

No	Jenis Industri	Kode KBLI	Jumlah
1	Industri Makanan	10	49.608
2.	Industri Minuman	11	6.525
3	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	16	3.046
4.	Industri Tekstil	13	648
5.	Industri Pakaian Jadi	14	367
6.	Industri Barang Galian Bukan Logam	23	358

No	Jenis Industri	Kode KBLI	Jumlah
7.	Industri Furnitur	31	259
8.	Industri Bukan Mesin dan Peralatannya	25	237
9.	Industri Barang Logam, Industri Alat Angkutan Lainnya	30	53
10.	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	21	25
11.	Industri Pengolahan Lainnya	32	25
12.	Industri Barang Dari Karet Dan Plastik	22	22
13.	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman,	18	11
14.	Industri Karet, Industri Mesin Dan Perlengkapan ytdl	28	4

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Maluku Dalam Angka 2025

Industri Besar Sedang di Pulau Maluku terdiri dari 36 Perusahaan yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1. 2 Jumlah Industri Besar Sedang Berdasar Jenis Industrinya

No	Jenis Industri	Kode KBLI	Jumlah
1	Industri Makanan	10	23
2.	Industri Minuman	11	2
3	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	16	1
4.	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman,	18	1
5.	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	20	3
6.	Industri Logam Dasar	22	3
7.	Industri Furnitur	31	2
8.	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	25	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Maluku Dalam Angka 2025

Untuk wilayah Papua, bergantung pada komoditas pertambangan, terutama tembaga, emas, dan minyak dan gas, yang menyumbang lebih dari separuh perekonomian provinsi tersebut. Selain

itu, sektor pertanian, yang mencakup komoditas seperti padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, kakao, kopi, dan hasil perikanan, serta sektor kehutanan dan perkebunan, juga menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi masyarakat.

Sesuai dengan data BPS Provinsi Papua dalam angka 2025, jumlah industry besar dan sedang di wilayah Papua berjumlah 17 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3 Jumlah Industri Besar dan Sedang Wlayah Papua

No	Jenis Industri	Kode KBLI	Jumlah
1	Industri Makanan	10	6
2	Industri Minuman	11	7
3	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Anyaman Rotan	16	3
4	Industri Furnitur	31	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Papua Dalam Angka 2025

Sedangkan jumlah industry Mikro dan Kecil di wilayah Papua sesuai dengan data BPS Provinsi Papua dalam angka 2025 berjumlah 7.646 unit sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Wlayah Papua

No	Jenis Industri	Kode KBLI	Jumlah
1	Industri Makanan	10	7.498
2	Industri Minuman	11	837
3	Industri Tekstil	13	1.242
4	Industri Pakaian Jadi	14	585
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	15	89
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Anyaman Rotan	16	1.173
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	17	5
8	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	18	53
9	Industri Farmasi, Obat dan Obat Tradisional	21	31
10	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	22	7
11	Industri Barang Galian Bukan Logam	23	667
12	Industri Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	25	141
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	28	2
14	Industri Kendaraan Bermotor	29	8

No	Jenis Industri	Kode KBLI	Jumlah
15	Industri Alat Angkutan Lainnya	30	234
16	Industri Furnitur	31	471
17	Industri Pengolahan Lainnya	32	323
18	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	33	50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Papua Dalam Angka

Untuk mendukung peran strategis tersebut, BSPJI Ambon melaksanakan kegiatan layanan sebagai berikut :

1. Pengujian

Unit pelaksana teknis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon memberikan jasa pengujian bahan baku, produk dan limbah industri. Berbagai jenis produk baik pangan maupun non pangan dapat di uji pada Laboratorium Uji BSPJI Ambon. Melalui laboratorium uji yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan persyaratan standar ISO 17025:2017 dengan Nomor : LP-383-IDN,



2. Sertifikasi

BSPJI Ambon adalah salah satu Lembaga Sertifikasi Produk (LsPro) dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang berada di Provinsi Maluku dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LSPR-089-IDN dengan ruang lingkup sertifikasi produk Minyak Kayu Putih berdasarkan SNI 3954 : 2014 dan Sertifikasi produk jenis Air Mineral berdasar SNI 3553 : 2015



3. Pelatihan

Pelatihan Teknis yang diberikan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon meliputi teknologi pengolahan produk perikanan (ikan asin, ikan asap, dendeng, abon, pindang, bakso, nugget, surimi, kecap ikan, presto, terasi dan lain-lain) Teknologi pengolahan rumput laut : ATC, karaginan, edible film, dodol, sirup, permen, selai, manisan, dan lain-lain. Pengolah produk pertanian/perkebunan : aneka kripik, aneka manisa, aneka kue sagu, aneka minuman (sirup, juice, anggur), nata de coco, VCO, minyak kelapa, kecap air kelapa, aneka selai dan aneka olahan kacang tanah. Pelatihan dibidang non-pangan : teknologi penyulingan minyak atsiri dan produk aroma terapi. BSPJI Ambon juga dapat memberikan pelatihan sistem manajemen, seperti ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, ISO 17065:2012, pelatihan yang terkait penerapan halal pada industri.

4. Konsultasi

Dengan didukung oleh pegawai yang kompeten sebagai pembina industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon memberikan jasa layanan konsultasi kepada pelanggan. Konsultasi yang diberikan meliputi konsultasi teknologi proses, konsultasi produk, konsultasi mengenai perekayasaan alat industri dan konsultasi penerapan sistem manajemen mutu pada industri. Salah bentuk konsultasi yang dilakukan oleh BSPJI Ambon adalah kegiatan melalui Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) bekerjasama dengan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (*Pusat OPTIKJI*)

5. Pemeriksaan Halal

BSPJI Ambon memiliki layanan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal yang telah terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2025 (LH-A-1P10000010118122). Ruang lingkup dari layanan LPH BSPJI Ambon adalah

Produk Kimiawi (kelompok produk kimia yang menjadi bahan peolong atau bahan tambahan), Makanan Minuman (Makanan minuman olahan termasuk restoran, catering dan rumah makan)

6. Rancang Bangun Perencanaan Industri

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon menyediakan jasa teknik perencanaan/rancang bangun industri yang mencakup peralatan proses teknologi tepat guna dengan kinerja yang teruji dan harga terjangkau. Jenis-jenis peralatan proses yang dapat dibuat oleh Bengkel BSPJI Ambon yaitu : alat pengering ikan, alat pengasapan ikan, alat pengolahan rumput laut, alat pengepres abon dan surimi, alat proses asap cair, dan penyulingan minyak atsiri (minyak kayu putih, minyak pala, minyak lawang, minyak sereh dan minyak cengkeh).

7. Kalibrasi

BSPJI Ambon memiliki Laboratorium Kalibrasi yang telah terakreditasi dengan nomor akreditasi LK-401-IDN dengan ruang lingkup Massa (timbangan analitik) dan Suhu (Oven, Inkubator, Waterbath)



8. Verifikasi TKDN

Verifikasi TKDN adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pencocokan capaian TKDN yang dinyatakan sendiri oleh penyedia barang/jasa dengan data-data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha penyedia barang/jasa. Keuntungan yang diperoleh dari verifikasi TKDN adalah

-Penyedia jasa dapat menerima fasilitas preferensi harga atas produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

-Industri pengguna mesin/peralatan produksi dalam negeri menerima tambahan fasilitas pembebasan Bea masuk atas barang dan bahan Baku impor.

- Pemerintah dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
- Personil penyedia jasa dapat menyusun alternatif rencana investasi dan pemilihan pemasok untuk mendukung capaian TKDN, menghitung sendiri capaian TKDN, dan memahami kebijakan P3DN.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 yaitu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Struktur Organisasi BSPJI di jelaskan pada pada pasal 90 ayat 3 yang mana disebutkan bahwa BSPJI di pimpin oleh Kepala BSPJI terdiri atas

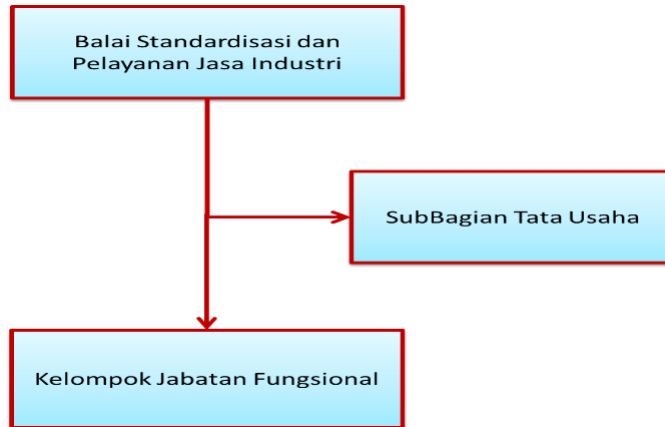
a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit pelaksana teknis masing-masing. Penugasan pejabat fungsional sebagai koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian berdasarkan usulan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BSPJI Ambon



Per 31 Desember 2025, BSPJI Ambon memiliki Sumber Daya Manuai (SDM) sebanyak 54 orang dengan komposisi sebagai berikut PNS: 36 orang, CPNS: 10 orang, PPPK: 8 orang, PPNP: 1 orang. Rekapitulasi pegawai BSPJI Ambon dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Golongan

Jenis Pangkat	Jumlah
Juru Tingkat I, I/d	1
Pengatur Muda, II/a	2
Pengatur Muda Tingkat I, II/b	1
Pengatur, II/c	9
Pengatur Tingkat I, II/d	1
Penata Muda, III/a	8
Penata Muda Tingkat I, III/b	7
Penata, III/c	4
Penata Tingkat I, III/d	10
Pembina, IV/a	2
Pembina Tingkat I, IV/b	1
V	3
VII	2
IX	3
Grand Total	54

b. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 1. 6 Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Jabatan Fungsional

Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah
Ahli Pertama - PRAKOM	1
Ahli Madya - AMMI	1
Ahli Madya - Pembina Industri	1
Ahli Muda - Analis Anggaran	1
Ahli Muda - Pembina Industri	7
Ahli Muda - Perencana	1
Ahli Pertama - AMMI	1
Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	1
Ahli Pertama - Arsiparis	1
Ahli Pertama - PEDAL	1
Ahli Pertama - Pembina Industri	1
Ahli Pertama - Penguji Mutu Barang	5
Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	1
Mahir - Pranata Keuangan APBN	1
Pemula - Penguji Mutu Barang	3
Penyelia - Pranata Keuangan APBN	1
Terampil - Arsiparis	1
Terampil - PEDAL	1
Terampil - Penguji Mutu Barang	2
Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat	1
Terampil - Pranata Komputer	1
Terampil - Taknisi Litkayasa	5
Grand Total	39

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Visi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon) 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi Kementerian Perindustrian, dan visi BSKJI.

RPJPN 2025-2045 memuat "Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Kata "Berdaulat" dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna "Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman"; secara khusus, kata "Mandiri" di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata "Maju" dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna "Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil"; secara khusus, kata "Inovatif" dan "Modern" sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata "Berkelanjutan" dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.



Gambar 2. 1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

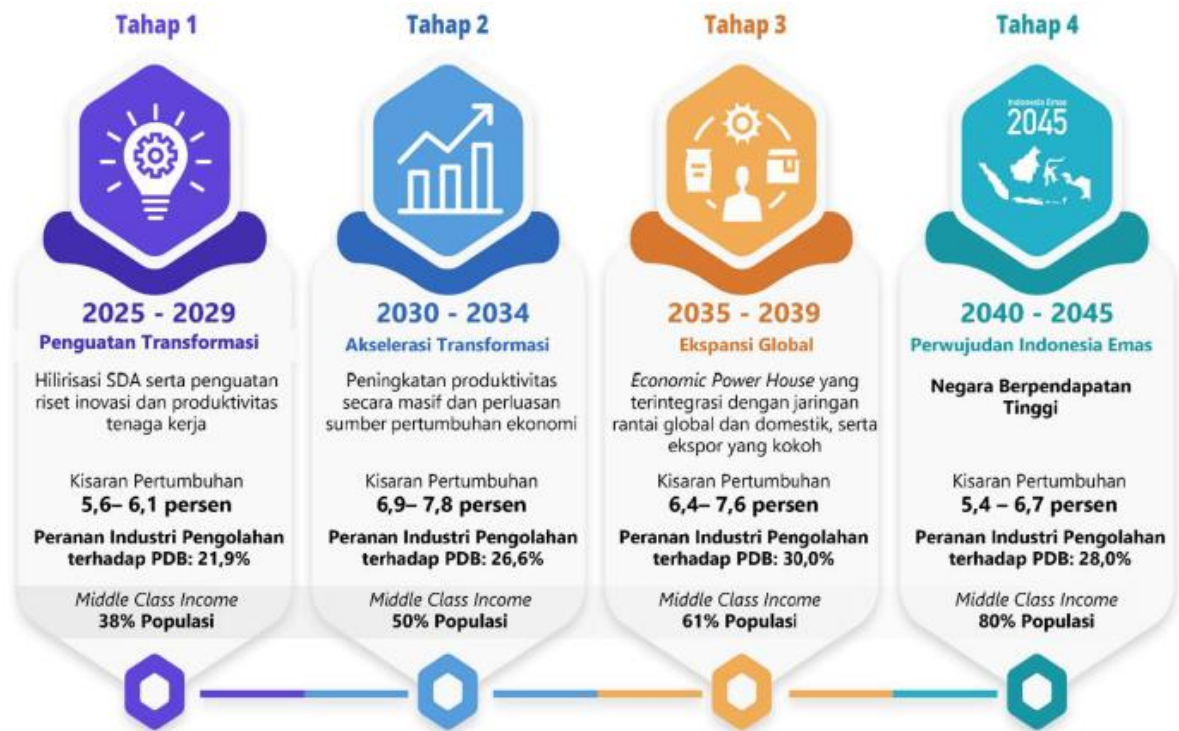
Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 66

Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia bermitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor) menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2. 2 Tahapan Transformasi Ekonomi

Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 91

Untuk itu, RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9 persen. Selain strategi industrialisasi untuk industri prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau. Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai net export positif.

Sejalan dengan RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Visi Kementerian Perindustrian: "Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029: "Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang maju, berdaulat dan berkelanjutan."

Selaras dengan visi BSKJI, maka **visi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon** ditetapkan sebagai berikut **“Menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”**.

Sesuai dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standardisasi industri yang mandiri, produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BSKJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Sejalan dengan misi BSKJI, maka misi (Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon) ditetapkan sebagai berikut **“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau”**

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 2. 3 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas.

Selaras dengan arah kebijakan industrialisasi di atas, tujuan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
	Indikator kinerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 3. Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Adapun untuk mendukung tujuan di tingkat Kementerian Perindustrian, tujuan dari BSKJI adalah sebagai berikut:

TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri Target 2025-2029 adalah 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (Persen) 2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional

	Target 2025-2029 adalah 3,12; 3,18; 3,23; 3,29; 3,35 (Persen)
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan
	<p>Indikator kinerja:</p> <p>Indikator kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi Target 2025-2029 adalah 96,43; 97,14; 97,86; 98,57; 99,00 (Persen) 2. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (<i>recycle content</i>) di sektor industri Target 2025-2029 adalah 11; 12; 13; 14; 15 (Persen) 3. Persentase pemanfaatan limbah B3 sektor industri Target 2025-2029 adalah 22; 23; 24; 25; 26 (Persen) 4. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 25; 27; 29; 31; 33 (Persen) 5. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 15; 17; 19; 21; 23 (Persen)

Sesuai tujuan BSKJI, maka ditetapkan tujuan dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri
	<p>Indikator kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target 2025-2029 adalah 3,63 ; 3,63; 3,64; 3,64; 3,65 (indeks) 2. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri* Target 2025-2029 adalah 100,105,110,115,120 (Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi)

Dari tujuan tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri.

Pengembangan sasaran kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon dilakukan dengan memperhatikan kedua pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran program BSKJI. Berikut Sasaran Program (SP) BSKJI untuk periode 2025-2029.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029

	Sasaran Program BSKJI	
TJ2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
TJ1	SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif
TJ1	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
TJ1	SP 4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif
TJ1	SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri
TJ1	SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional
TJ1	SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik
TJ1	SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
TJ1	SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Mengacu pada Sasaran Program BSKJI 2025-2029 tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon 2025-2029

Tujuan	Sasaran Kegiatan* Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	
TJ	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional
TJ	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri
TJ	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional
TJ	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik
TJ	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
TJ	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi

Tujuan	Sasaran Kegiatan* Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	
TJ	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

*) Kode Sasaran Kegiatan mengikuti kode pada Renstra BSKJI 2025-2029

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 7(tujuh) sasaran kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon yang ditentukan berdasarkan sasaran program BSKJI. Berikut adalah sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target dari indikator tersebut, yaitu:

- a. SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 80% , meningkat hingga 81% pada tahun 2026, meningkat hingga 82% pada tahun 2027, meningkat hingga 83% pada tahun 2028, dan meningkat hingga 84% pada tahun 2029,
 - 2) IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 40% pada tahun 2025, 41% pada tahun 2026, 42% pada tahun 2027, 43% pada tahun 2028 dan meningkat 45% pada tahun 2029.
- b. SK 6.2 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.2.1 Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar meningkat 2 indeks pada tahun 2025, indeks 3 pada tahun 2026, dan indes 4 untuk tahun 2027 sampai dengan 2029
 - 2) IKK 6.2.2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan bernilai 179 pada tahun 2025, meningkat hingga 205 pada tahun 2026, meningkat hingga 220 pada tahun 2027, meningkat hingga 235 pada tahun 2028, dan meningkat hingga 250 pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 0.02% pada tahun 2025, meningkat hingga 0,02 pada tahun 2026, meningkat hingga 0,03 pada tahun 2027, meningkat hingga 0,04 pada tahun 2028 hingga tahun 2029.
- c. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang Profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,30 pada tahun 2025, meningkat hingga 81,40 pada tahun 2026, meningkat hingga 81,50 pada tahun 2027, meningkat hingga 81,60 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 81,70 pada tahun 2029.
- d. SK 6.4 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.4.1 Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 20% pada tahun 2025, meningkat hingga 40% pada tahun 2026, meningkat hingga 60% pada tahun

- 2027, meningkat hingga 80% pada tahun 2028 dan meningkat hingga 100% pada tahun 2029.
- 2) IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 77 meningkat hingga 78 pada tahun 2026, meningkat hingga 80 pada tahun 2027, meningkat hingga 83 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 85 pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,60 meningkat hingga 3,90 pada tahun 2026, meningkat hingga 3,95 pada tahun 2027 dan meningkat hingga 4,01 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 4,04 pada tahun 2028.
- e. SK 6.5 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja program:
- 1) IKK 6.5.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60 pada tahun 2025, meningkat hingga 62 pada tahun 2026, meningkat hingga 65 pada tahun 2027, meningkat hingga 67 pada tahun 2028, dan meningkat hingga 70 pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.5.2 Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,1 pada tahun 2025, tahun 2026 meningkat menjadi 73, meningkat hingga 76 pada tahun 2027, meningkat hingga 79 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 82 pada tahun 2029
6. SK 6.6 Terwujudnya Akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
- 1) IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 79,50 pada tahun 2025 dan tetap hingga tahun 2026, meningkat hingga 79,70 pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2028 dan meningkat hingga 80,00 pada tahun 2029
 - 2) IKK 6.6.2 Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 94 hingga tahun 2026, meningkat hingga 94,50 pada tahun 2027 hingga tahun 2028 dan meningkat hingga 94,80 pada tahun 2029
 - 3) IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75, meningkat hingga 75,25 pada tahun 2026, meningkat hingga 75,5 pada tahun 2027, meningkat hingga 75,75 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 76 pada tahun 2029
7. SK 6.7 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri. SK 6.7 memiliki indikator kinerja:
- (1) IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75 % pada tahun 2025, meningkat hingga 76% pada tahun 2026, meningkat hingga 78 pada tahun 2027, meningkat hingga 79 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 81 pada tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaannya terhadap tujuan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon 2025-2029

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
TJ	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional							
	IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	80	80	81	82	83	84
	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	40	40	41	42	43	45
	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri							
	IKK 6.2.1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	iiindeks	621.000.000	2	3	4	4	4
	IKK 6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	170	179	205	220	235	250
	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional							
	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	76,80	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik							
	IKK 6.4.1	Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI	%	0	20	40	60	80	100
	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	-	77	78	80	83	85
	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,60	3,60	3,90	3,95	4,01	4,04
	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	IKK 6.5.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker	%	-	60	62	65	67	70
	IKK 6.5.2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan)	Nilai	18,50	70,1	73	76	79	82
	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi							
	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	77,15	79,50	79,50	79,70	79,70	80,00
	IKK 6.6.2	Nilai Minimal Indikator Kinerja	Nilai	93,82	94,00	94,00	94,50	94,50	94,80

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Pelaksanaan Anggaran (IKPA)							
	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75	75,25	75,5	75,75	76
	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri							
	IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	%	61,07	75,00	76,00	78,00	79,00	81,00

2.2 Rencana Anggaran Tahun 2025

Kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kinerja BSPJI Ambon Tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra BSPJI Ambon tahun 2025-2029, Renstra BSKJI 2025-2029 dan Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029. Kegiatan BSPJI Ambon Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan dari APBN yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 Nomor SP DIPA-019.07.2.248145/2025 dengan jumlah pagu awal anggaran **Rp9.358.210.000,-** (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sepuluh rupiah*) dengan rincian :

1. Rupiah Murni : Rp8.650.270.000
2. PNBP : Rp707.940.000

Dalam anggaran DIPA BSPJI Ambon terdapat :

1. Pagu Efektif : Rp. 7.603.210.000
2. Pagu Blokir : Rp. 1.755.000.000

Tabel 2.4 di bawah ini menunjukkan rincian anggaran Tahun 2025 BSPJI Ambon berdasarkan jenis indikator keluaran output dan anggarannya.

Tabel 2. 4 Komposisi Anggaran Kegiatan BSPJI Ambon Tahun 2025

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Belanja	Keluaran	
		Pagu	Target	Satuan
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	407.940.000		
6077.AEC	Kerjasama	34.688.000	1	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan
AEC.002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	34.688.000	3	Dokumen
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3.940.000	25	Orang
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	3.940.000	25	Orang
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	369.312.000	34	Industri

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Belanja	Keluaran	
		Pagu	Target	Satuan
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian	89.034.000	9	industri
BAD.024	Jasa Pelayanan teknis kalibrasi	47.400.000	8	industri
BAD.036	Jasa Pelayanan teknis sertifikasi	32.570.000	3	industri
BAD.047	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	104.000.000	1	industri
BAD.075	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	96.308.000	13	industri
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	8.950.270.000		
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.950.270.000	3	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	8.922.000	2	Layanan
EBA.994	Layanan Perkantoran	8.650.270.000	1	Layanan
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	41.500.000	5	Unit, M2, Per Paket
EBB.951	Layanan Sarana Internal	41.500.000	5	Unit
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	200.000.000	9	Orang, Layanan, Rekomendasi
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000	9	Orang
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	49.578.000		Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.500.000	2	Dokumen
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14.802.000	1	Dokumen
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	24.604.000	1	Dokumen
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	5.672.000	2	Dokumen
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	28.908.000	1.00	Dokumen

Komposisi Anggaran kegiatan BSPJI Ambon berdasarkan jenis belanja dijelaskan seperti pada tabel 2.5

Tabel 2. 5 Komposisi Anggaran Kegiatan Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1	Belanja Pegawai	5.650.270.000
2	Belanja Barang	3.666.440.000

3 Belanja Modal 41.500.000

Sejak di tetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 Nomor SP DIPA- 019.07.2.248145/2025 dengan jumlah pagu awal anggaran **Rp9.358.210.000,-** (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sepuluh rupiah*)BSPJI Ambon telah melakukan revisi sebanyak 15 (lima belas) kali dalam dalam kurun waktu dari triwulan I sampai dengan triwulan IV yaitu :

Tabel 2. 6 Rincian Revisi DIPA BSPJI Ambon TA 2025

No	Uraian	Tanggal	PAGU			Keterangan
			AWAL	AKHIR	BLOKIR	
1	2	3	4	5	6	7
	DIPA 0	29-Nov-24	Rp 9,358,210,000	9,358,210,000		Awal
1	DIPA 1	21-Feb-25	Rp 9,358,210,000	9,358,210,000	Rp 1,116,218,000.00	Blokir penggunaan Anggaran sebesar Rp 1.116.218.000 berdasarkan Nota Dinas No. 105/BSKJI/PR/II/2025 tanggal 17 Februari 2025
2	DIPA 2	21-Apr-25	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Relaksasi Blokir A Anggaran BSKJI TA 2025 berdasarkan Nota Dinas No. 239/BSKJI/PR/IV/2025 tanggal 14 April 2025
3	DIPA 3	28-May	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Perubahan catatan Halaman IV.A (Blokir)
4	DIPA 4	11-Jun	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Pergeseran Anggaran antar Program
5	DIPA 5	13-Jun	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000	Rp 1,589,739,000	Revisi Relaksasi Anggaran
6	DIPA 6	14-Jul	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Perubahan halaman III DIPA
7	DIPA 7	22-Aug	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000	Rp85,967,000	Relaksasi Blokir A Anggaran BSKJI TA 2025 Tahap II berdasarkan Nota Dinas No. 3086/BSKJI/PR/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025
8	Satker 2	25-Aug	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Revisi POK dan Halaman III DIPA
9	Satker 3	15-Sep	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Revisi POK dan Halaman III DIPA
10	DIPA 8	30 Sep	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Percepatan Realisasi (Pemutakhiran KPA)
11	DIPA 9	2 Oct	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Revisi POK dan Halaman III DIPA
12	DIPA 10	14 Oct	Rp 9,358,210,000	Rp10,385,687,000		Revisi Anggaran Penambahan Pagu PNBP
13	DIPA 11	14 Nov	Rp10,385,687,000	Rp10,450,837,000		Revisi Anggaran Penambahan Pagu PNBP
14	DIPA 12	4 Dec	Rp10,450,837,000	Rp10,705,593,000		Revisi Anggaran Penambahan Pagu PNBP
15	Satker 4	10 Dec	Rp10,705,593,000	Rp10,705,593,000		Revisi POK dan Halaman III DIPA
16	DIPA 13	31 Dec	Rp10,705,593,000	Rp10,705,593,000		Revisi Pemutakhiran KPA
17	DIPA 14	31 Dec	Rp10,705,593,000	Rp10,705,593,000		Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai

2.3 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian Perjanjian Kinerja BSPJI Ambon merupakan

janji kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala BSPJI Ambon kepada Kepala BSKJI selaku atasan langsung. Dasar hukum dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Inpres No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 2) Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/ M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja BSPJI Ambon tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.7

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja BSPJI Ambon Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Satuan	Target
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,63
		2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	100
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	80
		2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	40
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	179
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	0,02
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,30
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,60
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	60,00
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	70,10

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Satuan	Target
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,50
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,00
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75,00
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	75,00

Setelah dokumen Perjanjian Kinerja disusun, maka BSPJI AMBON menetapkan dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja memuat rencana kegiatan per-triwulan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Rencana Aksi untuk Perjanjian Kinerja BSPJI AMBON TA. 2025 disusun pada awal tahun dan mengikuti Perjakin yang ditetapkan di awal tahun 2025 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Tabel Rencana Aksi BSPJI Ambon TA 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas dan layanan jasa Industr	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63	25%	<ul style="list-style-type: none"> Rapat evaluasi layanan jasa tahun 2024 Perencanaan Kegiatan Pendistribusian Kuesioner kepada Pelanggan Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Januari, Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Februari Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Maret Laporan Indeks Kepuasan Pelanggan TW I 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Rapat evaluasi layanan jasa TW I TA 2025 Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan April, Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Mei Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Juni Laporan Indeks Kepuasan Pelanggan TW II 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Rapat evaluasi layanan jasa TW II TA 2025 Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Juli Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Agustus Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan September Laporan Indeks Kepuasan Pelanggan TW III 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Rapat evaluasi layanan jasa tahun TW III Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Oktober, Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan November Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Desember Laporan Indeks Kepuasan Pelanggan TW IV dan Akhir Tahun
		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan	100	25%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melakukan kegiatan 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		an layanan jasa industri							pengembangan kelembagaan		
2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Professional	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	80%	25%	- Membuat Perencanaan untuk Standar Pelayanan Minimum - melaksanakan layanan pengujian tepat waktu	50%	melaksanakan layanan pengujian tepat waktu	89%	melaksanakan layanan pengujian tepat waktu	100%	melaksanakan layanan pengujian tepat waktu
		Nilai Net Promoter Score (NPS)	40	25%	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan Survey NPS dan teknik surveynya melakukan Survey NPS TW I 	50%	<ul style="list-style-type: none"> melakukan Survey NPS TW II Melakukan evaluasi hasil survey NPS TW I 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Survey NPS TW III Melakukan evaluasi hasil survey NPS TW II 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Survey NPS TW IV Melakukan Evaluasi hasil Survey NPS TW III Melakukan perhitungan rekapitulasi hasil NPS

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	5	25%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan promosi dan pemasaran Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melaksanakan layanan jasa pengujian 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan promosi dan pemasaran Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melaksanakan layanan jasa pengujian 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan promosi dan pemasaran Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melaksanakan layanan jasa pengujian 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan promosi dan pemasaran Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melaksanakan layanan jasa pengujian
		Jumlah hasil layanan jasa industri	179	25%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melakukan Rapat Evaluasi internal lab, bengkel, LPH dan LS Pro terkait kegiatan tahun 2025 untuk TW I Melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melakukan Rapat Evaluasi internal lab, bengkel, LPH dan LS Pro terkait kegiatan tahun 2025 untuk TW II Melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melakukan Rapat internal lab, bengkel, LPH dan LS Pro terkait kegiatan tahun 2025 untuk TW III Melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis Melakukan Rapat internal lab, bengkel, LPH dan LS Pro terkait kegiatan tahun 2025 untuk TW IV Melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nilai Revenue on Asset (RoA)	0,02	25%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengelolaan dan inventarisasi Aset Melakukan Monitoring PNBPNBP Melakukan Perhitungan Nilai ROA TW I 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengelolaan dan inventarisasi Aset Melakukan Monitoring PNBPNBP Melakukan Perhitungan Nilai ROA TW II 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengelolaan dan inventarisasi Aset Melakukan Monitoring PNBPNBP Melakukan Perhitungan Nilai ROA TW III 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengelolaan dan inventarisasi Aset Melakukan Monitoring PNBPNBP Melakukan Perhitungan Nilai ROA TW IV
4	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30	25%	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi capaian nilai IP ASN pegawai hasil pelaporan dari Biro OSDM Evaluasi capaian nilai disiplin pegawai selama tahun 2024 Penilaian laporan kinerja pegawai tahun 2024 Penyusunan Program Pelatihan 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Januari - Maret Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan Januari -Maret. Rekapitulasi data kedisiplinan pegawai bulan April – Juni Evaluasi kedisiplinan pegawai bulan Januari-Maret 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan April-Juni Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan April-Juni Rekapitulasi data kedisiplinan pegawai bulan April – Juni Evaluasi kedisiplinan pegawai bulan April - Juni 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Juli-September Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan Juli-September Rekapitulasi data kedisiplinan pegawai bulan Juli September Evaluasi kedisiplinan pegawai bulan Juli-September

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20	25%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Perencanaan terkait sistem yang bisa diintegrasikan dengan BSKJI Melakukan koordinasi terkait integrasi sistem 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pengintegrasian dengan sistem informasi BSKJI TW II 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pengintegrasian dengan sistem informasi BSKJI TW III 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pengintegrasian dengan sistem informasi BSKJI TW IV
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,60	25%	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Tahun sebelumnya Pelaksanaan dan peningkatan aspek layanan public Pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana layanan publik 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan peningkatan aspek layanan publik Pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana layanan public Self assessment penilaian/evaluasi layanan publik Penyusunan laporan indeks layanan public Semesetr I 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan peningkatan aspek layanan publik Pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana layanan publik 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan peningkatan aspek layanan publik Pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana layanan public Self assessment penilaian/evaluasi layanan publik Penyusunan laporan indeks layanan public Semesetr II

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	25%	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan tim SPBE Melakukan rapat tim SPBE Menentukan rencana kerja tim SPBE 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu internal SPBE 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Reviu Manajemen SPBE 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu Penerapan SPBE
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	30	25%	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi dokumen dengan data dukung yang dipersyaratkan 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan bahan audit kinerja sesuai lokus yang diminta Pelaksanaan audit (Tentative) Penyiapan bahan tindak lanjut dari audit kinerja Koordinasi dengan tim kerja 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan dokumen tindak lanjut audit kinerja Penyusunan matrik tindak lanjut Pengiriman dokumen tindak lanjut audit kinerja 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring progress dokumen tindak lanjut audit kinerja
		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	60,10	25%	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengelolaan kearsipan, 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengelolaan kearsipan, 	89%	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan arsip Penciptaan arsip, Penggunaan arsip

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM yang kompeten di bidang kearsipan, • Melakukan pengelolaan arsip Penciptaan arsip, Penggunaan arsip bulan Januari - Maret 		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi SDM, • Melakukan pengelolaan arsip Penciptaan arsip, Penggunaan arsip bulan April - Juni 		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengelolaan kearsipan, • Melakukan pengelolaan arsip Penciptaan arsip, • Penggunaan arsip bulan Juli - September 			bulan Oktober - Desember

7	Terwujudnya akuntabilitas organisasil	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,50	25%	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan LAK Tahun 2024 • Rapat monev • Penyusunan Rencana Aksi, Rencana Kegiatan dan rencana Penarikan dana • Penyusunan dan penetapan Perkin 2025 • Rapat koordinasi program • Penyusunan angka dasar tahun 2025 dan input KRISNA • Penyusunan Satuan 3B • Penyusunan Renja, Renkin • Revisi DIPA penambahan pagu • Penilaian SAKIP • Penyampaian laporan capaian output Januari-Februari • Penyusunan Lap PP 39 TW I TA 2025 	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian laporan PP 39 TW I tahun 2025 • Penyampaian laporan capaian output Maret-Mei • Rapat monev Rencana Aksi dan Perjakin TW I • Revisi DIPA dan Pemutakhiran halaman III DIPA • Penyusunan dan pembahasan KAK dan RAB Tahun 2026 • Penyampaian dan pembahasan KAK dan RAB tahun 2026 kepada BSKJI • Penyusunan Lap PP 39 TW II TA 2025 	89%	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian laporan PP 39 TW II tahun 2025 • Penyampaian laporan capaian output Juni-Agustus • Rapat monev Rencana Aksi dan Perjakin TW II • Revisi DIPA dan Pemutakhiran halaman III DIPA • Penyusunan Lap PP 39 TW III TA 2025 	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan LAK Tahun 2025 • Rapat monev Rencana Aksi dan Perjakin TW III • penyampaian Laporan Capaian September-November • Rapat Monev Rencana Aksi dan Perjakin TW III • Penyusunan Laporan Pp 39 TW IV TA 2025
		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	25%	<p>Analisa perhitungan dan realisasi APBN,</p> <p>Analisa kebutuhan revisi anggaran,</p> <p>Revisi Anggaran,</p>	50%	<p>Analisa perhitungan dan realisasi APBN,</p> <p>Analisa kebutuhan revisi anggaran,</p> <p>Revisi Anggaran,</p>	89%	<p>Analisa perhitungan dan realisasi APBN,</p> <p>Analisa kebutuhan revisi anggaran,</p> <p>Revisi Anggaran,</p>	100%	<p>Analisa perhitungan dan realisasi APBN,</p> <p>Analisa kebutuhan revisi anggaran,</p> <p>Revisi Anggaran,</p>

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Revisi deviasi halaman III DIPA.		Revisi deviasi halaman III DIPA.		Revisi deviasi halaman III DIPA.		Revisi deviasi halaman III DIPA.
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75%	25%	Penyusunan Laporan BMN Tahunan TA 2024 Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024	50%	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan II Penyusunan Laporan BMN Semester I TA 2025	75%	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III	100%	Penyusunan Laporan BMN Semester 2 Penyusunan Laporan Keuangan TW iV

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	Persentase penggunaan produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	75%	25%	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan pagu kegiatan yang akan mendukung pencapaian target persentase TKDN • Penginputan SIRUP • Pelaksanaan PBJ bulan Januari - Maret • Evaluasi PBJ bulan Januari - Maret • Evaluasi dan Rekapitulasi Capaian Realisasi Penggunaan TKDN TW I 	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengadaan melalui EPurchasing/EKatalog/ Pengadaan langsung • Pengadaan belanja alat perkantoran, • Pelaksanaan PBJ Bulan April- Juni • Evaluasi PBJ bulan April-Juni • Evaluasi dan Rekapitulasi Capaian Realisasi Penggunaan TKDN TW II 	89%	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengadaan melalui EPurchasing/EKatalog/ Pengadaan langsung • Pengadaan belanja alat perkantoran, • Pelaksanaan PBJ Bulan Juli-September • Evaluasi PBJ bulan Juli - September • Evaluasi dan Rekapitulasi Capaian Realisasi Penggunaan TKDN TW III 	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengadaan melalui EPurchasing/EKatalog/ Pengadaan langsung • Pengadaan belanja alat perkantoran, • Pelaksanaan PBJ Bulan Oktober-Desember • Evaluasi PBJ bulan Oktober-Desember • Evaluasi dan Rekapitulasi Capaian Realisasi Penggunaan TKDN TW IV

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan telah benar-benar berjalan, dan seberapa besar manfaat yang diperoleh bagi upaya Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon dalam peran dan tupoksinya menunjang program kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Efektifitas kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tentunya sangat tergantung pada seberapa jauh sasaran dapat dicapai.

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) BSKJI tahun 2025-2029 dan RENSTRA Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon yang setiap awal tahun anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tahun 2025.

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 terdapat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator yang harus dicapai. BSPJI Ambon melaksanakan seluruh kegiatan dengan berfokus pada seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja yang optimal dan mampu memberikan outcome bagi masyarakat serta mencapai tujuan yang telah tertuang dalam renstra. Realisasi capaian kinerja BSPJI Ambon berdasarkan indikator pada Perjanjian Kinerja dilaksanakan berdasarkan rencana aksi. Pada sasaran kegiatan pertama, yakni **Meningkatnya Kualitas dan Layanan Jasa Industri** dengan indikator kinerja pertama "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri", dengan nilai rata-rata dari triwulan I-triwulan IV Tahun 2025 adalah 3,81. Selanjutnya, indikator kedua "Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri", pada Triwulan I-triwulan IV adalah 349 perusahaan/instansi/pelaku usaha.

Pada sasaran kegiatan kedua, yakni **Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Professional**, untuk indikator pertama "Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement (SLA)*" pada TA 2025 merupakan indikator baru dalam renstra BSKJI 2025-2029. SLA adalah persentase ketepatan layanan sesuai SLA adalah 93,67 atau realisasi sebesar 117,09% maka indikator ini dianggap **berhasil** memenuhi target yaitu 80% dan. Selanjutnya, indikator kedua "Nilai Net Promoter Score (NPS)" merupakan indikator baru dalam renstra BSKJI 2025-2029, telah dilakukan pengukuran loyalitas pelanggan terhadap layanan balai dan kemungkinan pelanggan untuk merekomendasikan kepada pelanggan yang lain, pada TA 2025 rata-rata nilai NPS BSPJI Ambon adalah 76,56 atau realisasi sebesar 191,40% maka indikator ini dianggap **berhasil** memenuhi target 40%.

Pada sasaran kegiatan ketiga, yakni **Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri**, untuk indikator pertama adalah "Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)", dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan jasa teknis seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, konsultasi, rancang bangun perkerjasama industri dan pelatihan. Pada akhir triwulan IV telah terealisasi sebesar

Rp 1.248.776.737 atau 101,09% maka indikator ini dianggap **berhasil** memenuhi target. Capaian indikator ini dibandingkan dengan tahun 2024 lebih rendah namun berhasil melampaui target.

Pada indikator kedua, "*Jumlah hasil layanan jasa industri*", pada tahun 2025 **berhasil melampaui target** yang telah ditetapkan hal ini dibuktikan dengan terealisasi sebanyak 808 order atau 451,40% dari target yang telah ditentukan.

Pada indikator ketiga, "*Nilai Revenue on Asset (RoA)*"; didapatkan nilai ROA adalah 0,039 atau sebesar 139% dari target yang telah ditetapkan dan **telah berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Pada sasaran kegiatan keempat, **Terwujudnya SDM yang profesional** dengan indikator "*Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)*", dilaksanakan melalui pengukuran IP ASN berdasarkan data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja seluruh pegawai yang pada tahun 2025 ini berdasarkan nota dinas dari Sekretariat Jenderal Nomor 96/SJ-IND.2/KP/I/2026 berada di nilai 74,93. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024, indikator ini **belum berhasil** mencapai target yang ditetapkan

Pada sasaran kegiatan kelima, **Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik**, indikator pertama "*Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI*" merupakan indikator baru yang sebelumnya belum pernah ada di Renstra, pada tahun 2025 telah dilaksanakan integrasi antara smart office dan SIPPT untuk 1 (satu) layanan dari total 7 (tujuh) layanan di BSPJI Ambon. Adapun layanan yang sudah terintegrasi adalah layanan pengujian dengan menggunakan API dimana nilainya adalah 14,29%. Indikator ini **belum berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

"Indikator kedua adalah "Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)" merupakan indikator baru dari Renstra BSKJI 2025-2029. Pada tahun 2025 ini **belum berhasil** mencapai target yaitu 44,5

Selanjutnya indikator ketiga adalah "*Indeks Pelayanan Publik (IPP)*" merupakan indikator yang sebelumnya sudah ada di renstra BSPJI Ambon 2021-2024. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan dengan cara melakukan evaluasi penilaian mandiri kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan kemudian dilakukan validasi oleh tim Evaluator BSKJI dengan hasil akhir adalah 4,24 (A-) kategori Sangat Baik. Indikator ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dan melebihi capaian dari tahun sebelumnya serta lebih tinggi dari beberapa balai di bawah BSKJI diantaranya BSPJI Manado dan BSPJI Jakarta.

Pada sasaran kegiatan keenam, "**Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien**", dengan indikator "*Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker*", Pada Triwulan IV telah semua rekomendasi telah dilaksanakan dan telah mendapatkan surat balasan dari Irjen dengan nomor R/174/U-IND/PW/X/2025 per tanggal 31 Oktober 2025. Indikator ini telah **berhasil** memenuhi target yang ditetapkan.

Selanjutnya indikator kedua adalah "*Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)*" pada Triwulan IV telah dilakukan validasi oleh tim evaluator dengan hasil akhir adalah 72,10 atau 102.85% dari realisasi target. Indikator ini telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan

Pada sasaran ketujuh, **Terwujudnya akuntabilitas organisasi**, dengan indikator "*Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker*", pada Tahun 2025 telah dilakukan penilain SAKIP dan BSPJI Ambon TA 2024 memperoleh nilai 82,10 dengan kategori A. Untuk penilaian tahun 2025 belum dilakukan, indikator ini belum bisa dikatakan berhasil atau tidak dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya indikator kedua adalah "*Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*" pada Triwulan IV ini telah dilakukan telah dilaksanakan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, analisa kebutuhan revisi anggaran, revisi Anggaran, Revisi deviasi halaman III DIPA. Nilai rata-rata IKPA BSPJI Ambon selama periode Januari-Desember 2025 adalah 88,03.

Indikator ketiga adalah, "*Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan*" ", pada Tahun 2025 telah dilakukan penilain Laporan Keuangan periode tahun anggaran 2024 dan BSPJI Ambon TA 2024 memperoleh nilai 94,25. Untuk penilaian tahun 2025 belum dilakukan, indikator ini belum bisa dikatakan berhasil atau tidak dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.pada tahun.

Pada sasaran kedelapan **Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri**, dengan indikator "*Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah*", pada tahun 2025 ini telah mencapai nilai 89,52 atau sebesar 119,36% dari target yang dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 dan Renstra 2021-2024

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2025			TAHUN 2024			TAHUN 2023			TAHUN 2022			TAHUN 2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,63	3,81	104,96%	3,63	3,75	103,31%	3,62	3,8	104,97%	3,6	3,79	105,28%	3,6	3,77	104,72%
	2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/ Instansi	100	349	349,00%	NA			NA			NA			NA		
Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	80	93,67	117,09%	NA			NA			NA			NA		
	2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	40	76,56	191,40%	NA			NA			NA			NA		
Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2	5	250,00%	621.00 0.000	4.140.735 .636	6667,85%	450.00 0.000	474.329.3 62	105,41%	428.60 0.00	587.580.1 84	137,09%	400.000. 000	260.353.5 00	65,09%
	2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	179	808	451,40%	5%	338%	6760,00%	4%	664%	16600,00 %	N/A		N/A			
	3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	0,02	0,039	195,00%	NA			NA			NA			NA		
Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,3	74,93	92,16%	77	76,98	99,97%	75	81,59	10879,00 %	72	74,28	93,00%	70	62	83,00%

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2025			TAHUN 2024			TAHUN 2023			TAHUN 2022			TAHUN 2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20	14,29	71,45%	NA			NA			NA			NA		
	2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77	44,545	57,85%	NA			NA			NA			NA		
	3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,6	4,24	117,78%	3,6	3,76	104,44%	3,5	4,21	120,29%	3,55	4,01	112,96%	3,5	3,5	100,00%
Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	60	100	166,67%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	92	100	108,70%	70,1	72,1	102,85%
	2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	70,1	72,1	102,85%	N/A			N/A			N/A			N/A		
Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,5	82,1	103,27%	79,5	82,1	103,27%	79,5	82,1	103,27%	79,5	82,1	103,27%	78	81,34	104,28%
	2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94	88,03	93,65%	N/A			N/A			N/A			N/A		

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2025			TAHUN 2024			TAHUN 2023			TAHUN 2022			TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75	94,25	125,67%	93	98,75	106,18%	92	98,75	107,34%	91	98	107,69%	90	88	97,78%
Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam engadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	75	89,52	119,35%	55	30,68	55,78%	50	79,08	158,16%	45	97,39	216,42%	40	40	100,00%

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2025

Berdasarkan dokumen Renstra BSPJI Ambon, Tujuan BSPJI Ambon dapat dirumuskan sebagai berikut :

- TJ : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri
- TJ1: Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri

Dari beberapa tujuan tersebut, terdapat indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut

Tabel 3. 2 Tujuan dan Indikator Kinerja

	Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	
TJ	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*
			2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*
TJ	SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
			2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)
TJ	SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			2	Jumlah hasil layanan jasa industri
			3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)
TJ	SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
TJ	SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
			2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
TJ	SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
			2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)
TJ	SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
			2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
			3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan
TJ	SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

	Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	
		rangka menunjang produktivitas industri		

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon yang ditentukan berdasarkan sasaran program BSKJI. Berikut adalah sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target dari indikator tersebut, yaitu:

1. SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 80% , meningkat hingga 81% pada tahun 2026, meningkat hingga 82% pada tahun 2027, meningkat hingga 83% pada tahun 2028, dan meningkat hingga 84% pada tahun 2029,
 - 2) IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 40% pada tahun 2025, 41% pada tahun 2026, 42% pada tahun 2027, 43% pada tahun 2028 dan meningkat 45% pada tahun 2029.

2. SK 6.2 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.2.1 Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar meningkat 2 indeks pada tahun 2025, indeks 3 pada tahun 2026, dan indes 4 untuk tahun 2027 sampai dengan 2029
 - 2) IKK 6.2.2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan bernilai 179 pada tahun 2025, meningkat hingga 205 pada tahun 2026, meningkat hingga 220 pada tahun 2027, meningkat hingga 235 pada tahun 2028, dan meningkat hingga 250 pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 0.02% pada tahun 2025, meningkat hingga 0,02 pada tahun 2026, meningkat hingga 0,03 pada tahun 2027, meningkat hingga 0,04 pada tahun 2028 hingga tahun 2029.

3. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang Profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,30 pada tahun 2025, meningkat hingga 81,40 pada tahun 2026, meningkat hingga 81,50 pada tahun 2027, meningkat hingga 81,60 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 81,70 pada tahun 2029.

4. SK 6.4 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.4.1 Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 20% pada tahun

- 2025, meningkat hingga 40% pada tahun 2026, meningkat hingga 60% pada tahun 2027, meningkat hingga 80% pada tahun 2028 dan meningkat hingga 100% pada tahun 2029.
- 2) IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 77 meningkat hingga 78 pada tahun 2026, meningkat hingga 80 pada tahun 2027, meningkat hingga 83 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 85 pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,60 meningkat hingga 3,90 pada tahun 2026, meningkat hingga 3,95 pada tahun 2027 dan meningkat hingga 4,01 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 4,04 pada tahun 2028.
5. SK 6.5 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja program:
- 1) IKK 6.5.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60 pada tahun 2025, meningkat hingga 62 pada tahun 2026, meningkat hingga 65 pada tahun 2027, meningkat hingga 67 pada tahun 2028, dan meningkat hingga 70 pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.5.2 Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,1 pada tahun 2025, tahun 2026 meningkat menjadi 73, meningkat hingga 76 pada tahun 2027, meningkat hingga 79 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 82 pada tahun 2029
8. SK 6.6 Terwujudnya Akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
- 4) IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 79,50 pada tahun 2025 dan tetap hingga tahun 2026, meningkat hingga 79,70 pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2028 dan meningkat hingga 80,00 pada tahun 2029
 - 5) IKK 6.6.2 Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 94 hingga tahun 2026, meningkat hingga 94,50 pada tahun 2027 hingga tahun 2028 dan meningkat hingga 94,80 pada tahun 2029
 - 6) IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75, meningkat hingga 75,25 pada tahun 2026, meningkat hingga 75,5 pada tahun 2027, meningkat hingga 75,75 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 76 pada tahun 2029
9. SK 6.7 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri. SK 6.7 memiliki indikator kinerja:
- (2) IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75 % pada tahun 2025, meningkat hingga 76% pada tahun 2026, meningkat hingga 78

pada tahun 2027, meningkat hingga 79 pada tahun 2028 dan meningkat hingga 81 pada tahun 2029.

Capaian kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon (BSPJI Ambon) dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel 3.4, menunjukkan bahwa pemetaan sasaran strategis BSPJI Ambon memiliki keselarasan dengan sasaran strategis BSKJI dan Kementerian Perindustrian.

Tabel 3. 3 Matriks Alur IKU BSKJI sampai Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun 2025

KEMENPERIN+A2:M28					BSKJI				BSPJI AMBON			
Kode	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
TJ	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional	1. Rasio industri pengolahan nonmigas terhadap PDB* 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas* 3. Pertumbuhan PDB industri pengolahan	SS1. Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional	SS1..1 Pertumbuhan PDB Kelompok Industri Prioritas						Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri		
			SS2.Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif	SS2. IK 2.1 Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri	SP 2 Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif	SP 2 IKP 2.1 Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri				
				SS2.IK.2.2 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas			SP 4. Meningkatkan kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif	SP 4 IKP 4.1 Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	SP 4 . SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional		<ul style="list-style-type: none"> • IK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) • IKK 6.1.12 Nilai Net Promoter Score (NPS) 	

KEMENPERIN+A2:M28					BSKJI				BSPJI AMBON			
Kode	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
				SS2.IK.3 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja							SP 4 SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	• IKK 6.2.1 Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) • IKK 6.2.2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri • IKK 6.2.3 Nilai Revenue on Asset (RoA)
				SS2.IK.2.4 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Industri Kecil dan Menengah								
			SS3.Meningkatnya Persebaran Industri	SS3.IK 3.1 Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa								

KEMENPERIN+A2:M28					BSKJI				BSPJI AMBON			
Kode	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
			SS4. Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi	SS4.1 Perusahaan dengan Nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	TJ 1	Meningkatnya dukungan standarisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri	SP 3 Meningkatkan daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi	SP 3 IKP 3.1 Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri				
								SP 3 IKP 3.2 Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur				
			SS5, Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan	SS5.1 Penurunan Emisi GRK pada Sektor Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi	TJ 2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk	SP1. Meningkatkan praktik industri hijau dan ekonomi sirkular	SP 1. IKP 1.1 Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi Industri Hijau				

KEMENPERIN+A2:M28					BSKJI				BSPJI AMBON			
Kode	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
				SS5.2 Rasio Penggunaan Material Sirkular di Sektor Industri		ekonomi berkelanjutan		SP1 IKP 1.2 Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi				
			SS6. Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmiga	SS6.1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas terhadap Total Ekspo								
				SS6.2 Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi								

KEMENPERIN+A2:M28					BSKJI				BSPJI AMBON			
Kode	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
				SS6.3 Diversifikasi Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah								
				SS6.4 umlah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah yang Berdaya Sain								
			SS7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian	SS7.1 Indeks RB Kementerian Perindustrian	TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri	SP5.Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	SP 5 IKP 5.1 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah			SP 5 - SK 6.7 Meningkatnya Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang aktivitas industri	SK 6.7 - IKK 6.7.1 "Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
							SP 6Terwujudnya SDM yang profesional	SP 6 IKP 6.1 Indeks profesionalitas ASN.			SP 6. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang Profesional	SK 6.3 IKK 6.3.1 Indeks Profesional ASN (IP ASN)

KEMENPERIN+A2:M28					BSKJI				BSPJI AMBON			
Kode	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
							SP 7 Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik	<p>SP 7 IKP 7.1 Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI</p> <p>SP 7 IKP 7.2 Indeks Manfaat Kerja Sama</p>			SP 7 SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • ISK 6.4 IKK 6.4.1 "Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI; • SK 6.4 - IKK 6.4.2 "Tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)"; •SK 6.4 - IKK 6.4.3 "Indeks Pelayanan Publik (IPP)",

KEMENPERIN+A2:M28					BSKJI				BSPJI AMBON			
Kode	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
								SP 7 IKP 7.3 Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik minimal A				
								SP 7 IKP 7.4 Tingkat penerapan SPBE dan kesiapan statistik sektoral				
							SP 8 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SP 8 IKP 8.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh satker BSKJI			SP 8 SK6.5 Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • SK 6.5 - IKK 6.5.1 "Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindak lanjuti oleh Satuan Kerja (Satker)"; • SK 6.5 - IKK 6.5.2 "Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

KEMENPERIN+A2:M28					BSKJI				BSPJI AMBON			
Kode	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
								SP 8 IKP 8.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan).				
							SP 9. Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SP 9(IKP 9,1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI.			SP 9 SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK 6.6 - IKK 6.6.1 "Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) • SK 6.6 - IKK 6.6.2 "Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)" • SK 6.6 - IKK 6.6.3 "Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan"

KEMENPERIN+A2:M28					BSKJI				BSPJI AMBON			
Kode	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kode	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
								SP 9 IKP 9.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.				
								SP 9 IKP 9.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan				

Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab II, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, *e-monitoring*, dan ALKI. Adapun realisasi fisik per triwulan ditunjukkan pada Tabel 3.5

Tabel 3. 4 Realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi 2025

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,63	3,81	104,96%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
		2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/ Instansi	100	349	349,00%	25%	25%	50%	150%	89%	89%	100%	100%
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	Persen	80	93,67	117,09%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
		2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	Nilai	40	76,56	191,40%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2	5	250,00%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	179	808	451,40%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
		3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	Persen	0,02	0,039	195,00%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,3	74,93	92,16%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20	14,29	71,45%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77	44,545	57,85%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,6	4,24	117,78%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
SK 5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	60	100	166,67%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	70,1	72,1	102,85%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Twriwulan I		Twriwulan II		Twriwulan III		Twriwulan IV	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,5	82,1	103,27%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94	88,03	93,65%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75	94,25	125,67%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	75	81,12	108,16%	25%	25%	50%	50%	89%	89%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.4, dapat kita lihat bahwa sebagian besar dari keseluruhan indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan namun ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target sasaran. Penjelasan yang lebih lengkap akan diuraikan pada capaian per indikator. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat tetap mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi, dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Adapun penjelasan hasil capaian kinerja Perjanjian Kinerja TA.2025 yang telah dilaksanakan dari masing-masing Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan pada Perjanjian Kinerja TA. 2025

Untuk seluruh tujuan yang telah ditetapkan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon masing-masing didukung oleh indikator-indikator kinerja sehingga tujuan tersebut mampu terukur.

1. Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan (TJ). Tujuan (TJ) terdiri dari 2 (dua) indikator kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama BSPJI Ambon yaitu:

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri

Tujuan ini memiliki dua indikator utama seperti yang dijabarkan pada **Tabel 3.5**. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 3,63 dan terrealisasi 3,81 dengan persentase capaian adalah 104,90%. Indikator Utama yang ke 2 adalah indikator Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri memiliki target sebesar 100 terrealisasi 349 dengan persentase capaian 349%.

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,63	3,81	104,96%
		2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/ Instansi	100	349	349,00%

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator

sasaran kegiatan yang termasuk pada indikator utam akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya yaitu pada sub bagian sasaran strategis.

a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama.

1) Hasil yang telah dicapai

Capaian peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri pada tahun 2025 telah berhasil mencapai target. Hal ini disebabkan pelayanan kepada pelanggan yang diberikan oleh BSPJI Ambon dinilai telah mampu menjawab kebutuhan pelanggan baik dari segi kemampuan, area layanan dan pelayanan

2) Analisa hasil yang telah dicapai

Capaian peningkatan indikator kinerja tujuan telah mencapai target hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan /permasalahan dari industri yang sesuai dengan kompetensi balai. Adanya sarana dan SDM yang berkompeten juga sebagai faktor keberhasilan indikator ini. Koordinasi yang intens dengan industri juga menyebabkan hasil konsultasi yang diberikan oleh balai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target tujuan.

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 optimalisasi kerjasama di antara semua bagian di BSPJI Ambon dalam rangka kegiatan kolaborasi antara balai dengan industri, peningkatan kemampuan SDM konsultan balai, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pendampingan konsultasi sehingga diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan BSPJI Ambon yaitu meningkatnya kualitas dan Kuantitas layanan jasa industri.

b. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*

1) Hasil yang telah dicapai

Capaian peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri pada tahun 2025 telah berhasil mencapai target. Hal ini disebabkan pelayanan kepada pelanggan yang diberikan oleh BSPJI Ambon dinilai telah mampu menjawab

Tabel 3. 6 Tabel Pelanggan BSPJI Ambon

Layanan Pengujian	Layanan Kalibrasi	Layanan Sertifikasi	Layanan Halal	Layanan Konsultasi	Layanan RBPI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pt. Wahana Lestari Investama 2. Pt PLN Nusantara Power Construction 3. Pt. Milion Limbah Ambon 4. Pt. Globalindo Mutiara 5. Balai Laboratorium Kesehatan 6. Pt. Siloam International Hospital 7. Pt. Citra Pramita Sejahtera 8. The Natsepa Hotel & Resort 9. Pt. Perikanan Indonesia 10. Pt. Dafin Mutiara 11. Cv. Batu Seram Jaya 12. Pltmg Waai, Maluku Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UD. AIN 2. UD. Citra 3. Balai Labkes/BLKM/BTKL 4. UD. Rocky 5. UD. Tiga mitra mandiri 6. PT. DSA 7. CV. Super inti perkasa 8. Balai Karantina Ambon 9. Dinas Kesehatan Seram Bagian Timu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV. Katong Punya 2. UD. Rajawali Permai 3. CV Arahadi 4. CV Amter 5. PT Danisdi Waelo Matai 6. CV Abadi Tiga Mandiri 7. CV Shifanah Makmur 8. UMKM Yanain 9. UMKM Bunga Tani 10. PT Firda Jaya Permai 11. UD. Rajawali Permai 12. CV Amter 13. CV Bintang Jaya Mineral 14. CV Kenney Jhon Putra Tunggal 15. UD Rocky 16. PT. Dream Sukses Airindo 17. UD Tiga Mitra 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fentia Sitaniapessy 2. Yayasan Erlima Citra Mandiri Ambon 3. UD. Rocky 4. Yayasan Cendekia Maluku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baitul Muamalat 2. CV. Sinar Bumi Pratama 3. La Maeni 4. Yayasan Harmoni Indonesia 5. Wendrik Ardianto (CV. Permai) 6. UMKM Cempaka 7. Vanny leutualy UKIM 8. Trisetiyo Purnomo

Layanan Pengujian	Layanan Kalibrasi	Layanan Sertifikasi	Layanan Halal	Layanan Konsultasi	Layanan RBPI
		Mandiri 18. UD AIN 19. CV Super Inti Perkasa 20. PT Evav Inti Sejahtera 21. CV Aquarius Perkasa 22. UD Citra			

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target tujuan.

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 optimalisasi kerjasama di antara semua bagian di BSPJI Ambon dan *stakeholder* dalam rangka kegiatan kolaborasi antara balai dengan industri, peningkatan kemampuan SDM konsultan balai, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pendampingan konsultasi sehingga diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan BSPJI Ambon yaitu meningkatnya kualitas dan Kuantitas layanan jasa industri.

3.1.3 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja TA. 2025

1. SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional.

SK 6.1 memiliki 2(dua) indikator kinerja yaitu :

- (1) Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)
- (2) Nilai *Net Promoter Score* (NPS).

Indikator Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 80% dan terrealisasi sebesar 93,67% dengan persentase capaian adalah 117,09%. Indikator Nilai *Net Promoter Score* (NPS) pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 40 dan terrealisasi sebesar 76,56 dengan persentase capaian adalah 191,40%. Nilai rata-rata realisasi indikator indikator pada Sasaran Kegiatan 6.1 sebesar 154,25%.

Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.1

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	80	93,67	117,09%
		2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	40	76,56	191,40%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							154,25%

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada sasaran kegiatan 6.1 akan dijelaskan sebagai berikut.

a) **IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement (SLA)*.**

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 80% Keberhasilan indikator ini dihitung dari jumlah order/SPK transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu berdasar standar pelayanan minimal pada tahun berjalan. Adapaun cara perhitungannya adalah jumlah order/SPK transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu berdasar standar pelayanan minimal pada tahun berjalan dibagi total order tahun berjalan dikalikan 100%

(1) Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%. Hasil dari persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *service level agreement* **berhasil** melampaui target yang ditetapkan dengan nilai akhir adalah 93,67 diselesaikan tepat waktu atau nilai realisasinya sebesar 117,09%

(2) Analisis hasil yang telah dicapai

Indikator ini merupakan indikator baru yang terdapat dalam renstra BSPJI Ambon 2025-2029. Pada tabel 3.7 akan dijelaskan pencapaian SLA per triwulan.

Tabel 3. 8 Pencapaian SLA per triwulan

Indikator Kinerja	Realiasi TW 1	Realiasi TW 2	Realiasi TW 3	Realiasi TW 4
Pengujian	80	89.31	47.03	79.44
Kalibrasi	0	100	100	100
Sertifikasi	100	100	100	75
Pelatihan	0	0	100	100
LPH	100	67	100	80
Konsultansi	0	0	100	100
RBPI	0	100	75	100
Rata- Rata SLA Per Triwulan	93,33	91,26	88,86	90,63
Rata-rata SLA TA 2025	92,30			

SLA Pelayanan Pengujian Tepat Waktu belum tercapai secara konsisten sepanjang tahun berjalan. Kinerja yang baik pada Triwulan I tidak dapat dipertahankan pada triwulan berikutnya, terutama akibat tingginya ketergantungan pada pengujian subkontrak di balai lain. Beberapa parameter

seperti warna, bromate, MBAS, fosfat dan fitoplankton tidak bisa dilakukan pengujian di Balai. Perlakuan subkon ini didasarkan pada peralatan dan pereaksi tidak memadai kondisi ini berdampak signifikan terhadap penurunan SLA, khususnya pada Triwulan III. Selain itu penurunan SLA terjadi karena pada aplikasi Smart Office untuk tanggal merah di hari kerja itu tetap terhitung sebagai hari kerja aktif

(3) Kendala

- Beberapa parameter seperti warna, bromate, MBAS, fosfat dan fitoplankton tidak bisa dilakukan pengujian di Balai. dikarenakan pada peralatan dan pereaksi tidak memadai.
- Aplikasi Smart Office masih menghitung hari kerja sebagai hari kerja aktif

(4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 optimalisasi untuk pengadaan peralatan dan pereaksi laboratorium untuk mengurangi ketergantungan sub kontrak dengan pihak ketiga. Melakukan perbaikan pada Smart office untuk bisa mengakomodir perhitungan SLA mengecualikan hari libur.

b) **IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS).**

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 40% pada tahun 2025. Keberhasilan indikator ini dilihat dari nilai loyalitas pelanggan terhadap layanan Balai dan seberapa besar mereka akan mempromosikan layanan Balai kepada orang lain. Cara menghitung NPS: Skor NPS dihitung dengan mengurangi persentase Detractors dari persentase Promoters.

$$NPS = \%Promoters - \%Detractors$$

*Keterangan

- Promoters (9-10): Pelanggan sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.
- Passives (7-8): Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.
- Detractors (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan

(1) Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%. Hasil dari Nilai *Net Promoter Score* **telah berhasil** melampaui target yang ditetapkan dengan nilai akhir adalah 76,56 diselesaikan tepat waktu atau nilai realisasinya sebesar 191,40%

(2) Analisis hasil yang telah dicapai

Indikator ini merupakan indikator baru yang terdapat dalam renstra BSPJI Ambon 2025-2029. Pada tabel 3.8 akan dijelaskan pencapaian NPS per triwulan.

Tabel 3. 9 Pencapaian Nilai NPS per triwulan

Indikator Kinerja	Realiasi TW 1	Realiasi TW 2	Realiasi TW 3	Realiasi TW 4
Nilai NPS per triwulan	25	87,5	95,45	98,28
Rata-Rata	76,56			

Pada tahun pelaporan, kinerja indikator Net Promoter Score (NPS) menunjukkan capaian yang sangat baik dengan target sebesar 40. Realisasi NPS pada Triwulan I tercatat sebesar 25 dan belum mencapai target hal ini dikarenakan pada triwulan I masih ditentukan tata cara teknik surveynya. Namun demikian, pada Triwulan II hingga Triwulan IV terjadi peningkatan kinerja yang signifikan, dengan realisasi masing-masing sebesar 87,50; 95,45; dan 98,28, yang seluruhnya melampaui target yang ditetapkan. Secara umum, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

(3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target tujuan.

(4) Tindak Lanjut

Untuk menjaga agar target *Net Promoter Score* (NPS) pada Tahun 2026 tetap tercapai dan berkelanjutan, instansi akan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- Penguatan Kualitas Layanan *Frontline* melalui pembinaan berkelanjutan, penegasan standar pelayanan, serta penguatan budaya pelayanan prima untuk memastikan pengalaman pengguna layanan tetap positif dan konsisten.
- Peningkatan Kecepatan dan Kepastian Layanan khususnya pada layanan yang berdampak langsung terhadap persepsi pengguna, guna meminimalkan keluhan dan menjaga tingkat kepuasan pelanggan.
- Pemanfaatan Umpan Balik Pengguna Layanan melalui penyempurnaan

prosedur layanan serta perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

- Penguatan Komunikasi dan Informasi Layanan dengan cara penyediaan informasi layanan yang jelas, mudah diakses, dan transparan akan terus ditingkatkan guna membangun kepercayaan dan ekspektasi yang realistis dari pengguna layanan.

2. SK 6.2 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri.

SK 6.2 memiliki indikator kinerja program memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- (1) Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- (2) Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri.
- (3) Nilai *Revenue on Asset* (RoA).

Indikator Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar indeks 2 dan terrealisasi dengan indeks 5 dengan realisasi capaian 250%. Indikator Jumlah hasil layanan jasa industri ditargetkan 179 hasil layanan dan terrealisasi 808 hasil layanan dengan persentase 451,40%. Indikator Nilai *Revenue of Asset* ditargetkan 0,02% dan terrealisasi 0,039% dengan persentase 195,00%. Nilai rataan realisasi indikator indikator pada sasaran kegiatan 6.2 sebesar 299,00%.

Tabel 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.2

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2	5	250,00%
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	179	808	451,40%
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	0,02	0,039	195,00%
Nilai rataan realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						299,00%	

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada sasaran kegiatan 6.2 akan dijelaskan sebagai berikut:

a) IKK 6.2.1 Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar indeks 2 pada tahun 2025, Keberhasilan Indikator ini dihitung dari data realisasi target PNBP layanan jasa industri dalam rupiah pada tahun berjalan.

$$\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$$

(1) **Hasil yang telah dicapai**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BSPJI Ambon adalah kegiatan pelayanan yang meliputi pengujian, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Realisasi target PNBPN tersebut perlu dievaluasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Pada tahun anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan realisasi fisik adalah 100%. Pada tahun 2025 penerimaan PNBPN BSPJI Ambon Rp1.248.776.737,00 (data per 31 Desember 2025) persentase realiasi peningkatan penerimaan PNBPN dengan baseline PNBPN tahun 2024 Rp621.000.000 adalah sebesar 101,09% (indeks 5). Dari target yang telah di tentukan indeks 2 dan capaian indeks 5 maka persentase capaian adalah 250%

(2) **Analisis hasil yang telah dicapai**

Baseline PNBPN tahun 2024 adalah Rp 621.000.000, capaian PNBPN TA 2025 adalah Rp1.248.776.737,00 maka persentase peningkatan PNBPN adalah 101,09%. Berdasarkan range yang ada maka indikator ini berada pada indeks 5.

Tabel 3. 11 Indeks peningkatan PNBPN

Indeks	Range Peningkatan PNBPN
1	≤ 5%
2	5 < x ≤ 20
3	20 < x ≤ 50
4	50 < x ≤ 100
5	>100

Dengan demikian maka dari target yang telah di ditetapkan pada indeks 2, maka BSPJI Ambon berada pada indeks 5, persentase capaian tersebut adalah 250%. Rincian penerimaan PNBPN dari masing-masing layanan dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini

Tabel 3. 12 Rincian Penerimaan PNBPN TA 2025 per Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengujian: PPC:	325.150.000	503.372.000 75.260.000	177,95%
2	Kalibrasi	15.600.000	3.935.000	25,22%
3	Sertifikasi	97.450.000	151.931.000	155,90%
4	Pelatihan	45.000.000	35.075.000	77,94%
5	LPH	36.000.000	45.300.100	125,83%
6	Konsultansi	26.000.000	115.398.751	443,84%

No	Jenis Layanan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	RBPI (Optimalisasi)	200.000.000	222.000.000	111%
8	PNBP(UMUM)	-	96.504.886	
	TOTAL	745.200.000	1.248.776.737	

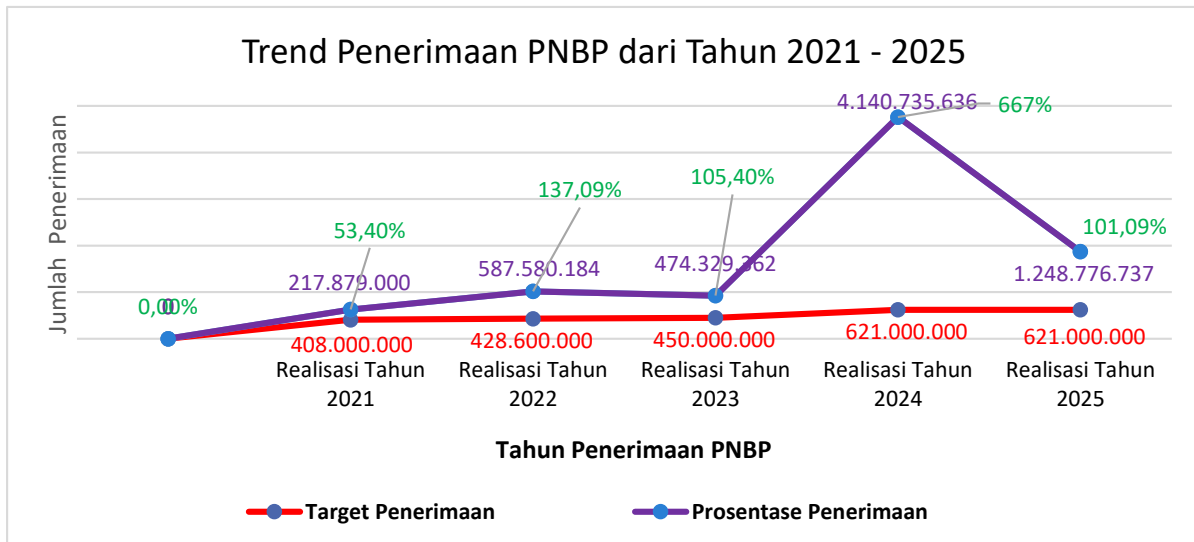
Perkembangan penerimaan PNBP layanan jasa industri BSPJI Ambon dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini

Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Meningkatnya PNBP layanan jasa industri TA 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Target Penerimaan	408.000.000	428.600.000	450.000.000	621.000.000	621.000.000
Realisasi Penerimaan	217.879.000	587.580.184	474.329.362	4.140.735.636	1.248.776.737
Prosentase Penerimaan	53,40%	137,09%	105,40%	667%	101,09%
Rata – Rata Peningkatan realisasi PNBP	212,80%				

Pada tahun 2021 BSPJI Ambon memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp408.000.000,- dan realisasi dari target penerimaan tersebut adalah Rp.217.879.000,- (53,40%). Pada tahun 2022 BSPJI Ambon memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp428.600.000,- dan realisasi dari target tersebut adalah Rp587.580.184,- (137,09%). Pada tahun 2023 BSPJI Ambon memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp450.000.000,- dan realisasi dari target tersebut adalah Rp474.329.362,- (105,40%). Pada tahun 2024 BSPJI Ambon memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp621.00.000,- dan realiasi sebesar Rp4.140.735.636 (667%). Pada tahun 2025 BSPJI Ambon memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp621.00.000,- dan realiasi sebesar Rp1.248.776.737 (101,09). Tren target dan realisasi penerimaan PNBP TA 2021-2025 dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini

Gambar3.2 Grafik Trend Penerimaan PNBP Tahun 2021-2025



Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata peningkatan penerimaan PNBP BSPJI Ambon adalah 212,80%. Peningkatan PNBP yang signifikan di tahun 2024 dikarenakan adanya pemasukan dari kegiatan pelatihan yang merupakan rangkaian kegiatan DAK Non Fisik dari beberapa kabupaten. Selain hal itu kenaikan PNBP yang signifikan di dukung dengan adanya berbagai kegiatan layanan yang diberikan kepada pelanggan seperti LSPro, LPH, Lab Pengujian, Lab Kalibrasi, dan Rancang Bangun Perencanaan Industri. Layanan yang diberikan kepada masyarakat juga didukung oleh terakreditasinya layanan tersebut oleh Lembaga yang berkompeten yaitu KAN (Komite Akreditasi Nasional). Namun pada tahun 2025 penerimaan PNBP mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya lagi kegiatan DAK yang di tangani oleh BSPJI Ambon, namun demikian BSPJI masih bisa mencapai target karena telah memiliki Laboratorium Lingkungan yang telah terregistrasi ke Kementerian Lingkungan Hidup sehingga membuka peluang pemasukan baru bagi Penerimaan PNBP dan adanya dukungan dari *stakeholder* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon yang merekomendasikan para pelaku usaha untuk melakukan perngujian lingkungan di BSPJI Ambon





(3) **Kendala**

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target tujuan

(4) **Tindak Lanjut**

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 pentingnya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjangkau pelanggan menggunakan jasa layanan yang dimiliki oleh BSPJI Ambon. BSPJI Ambon melakukan promosi yang lebih intens untuk peningkatan jumlah layanan, serta melakukan peningkatan kompetensi pegawai maupun Layanan untuk mendukung pelayanan yang prima.

b) **IKK 6.2.2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri.**

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan bernilai 179. Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam periode satu tahun.

(1) **Hasil yang telah dicapai**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BSPJI Ambon adalah kegiatan pelayanan yang meliputi pengujian, rancang bangun dan perekayasa di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Pada Tahun Anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan realisasi adalah 100% Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 ini adalah melakukan pengembangan kelembagaan dalam bentuk mempersiapkan dokumen untuk akreditasi lab, melakukan layanan

pengujian lingkungan di beberapa perusahaan, melakukan proses sertifikasi. Adapun rincian jumlah layanan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Meningkatnya PNPB layanan jasa industri TA 2021-2025

No	Jenis Layanan	LHU, Sertifikat Pelatihan, Sertifikat Ls Pro, IKM Halal, Laporan, Alat			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Pengujian	100 LHU	241 LHU	185 LHU	169 LHU
2	Kalibrasi	0 LHU	3LHU	2 LHU	19 LHU
3	Sertifikasi	4 Sertifikat	4 Sertifikat	1 Sertifikat	10 Sertifikat
4	Pelatihan	10 Peserta	-	1 Peserta	12 Peserta
5	LPH	18 IKM	6 IKM	4 IKM	58 IKM
6	Konsultasi	3 IKM	-	1 IIKM	7 IIKM
7	RBPI	0 Unit	1 Alat	6 Alat	11 Alat
8	DAPATI	0 IKM	0 IKM		
9	Verifikasi TKDN	-	54		
	Jumlah total	135	255	201	217

(2) Analisis hasil yang telah dicapai

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan layanan jasa industri selama Tahun Anggaran berjalan, BSPJI/BSKJI mencatat total realisasi layanan sebanyak 808 output, dengan distribusi capaian per triwulan yaitu 135 pada Triwulan I, 255 pada Triwulan II, 201 pada Triwulan III, dan 217 pada Triwulan IV. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan berjalan sepanjang tahun dengan kecenderungan peningkatan realisasi pada semester II sebagai hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Layanan Pengujian merupakan kontributor utama capaian kinerja dengan realisasi tertinggi pada setiap triwulan, khususnya pada Triwulan II sebesar 241 Laporan Hasil Uji (LHU). Kondisi ini mencerminkan tingginya kebutuhan layanan pengujian dari pelaku industri serta peran strategis laboratorium BSPJI/BSKJI dalam mendukung peningkatan mutu produk industri. Meskipun terjadi penurunan volume pada Triwulan III dan IV, layanan pengujian tetap menunjukkan tingkat keberlanjutan yang baik.

Layanan Kalibrasi dan Sertifikasi menunjukkan peningkatan signifikan pada akhir tahun. Kalibrasi yang belum terealisasi pada Triwulan I mulai meningkat secara bertahap hingga mencapai 19 LHU pada Triwulan IV, sementara layanan Sertifikasi meningkat dari 1 sertifikat pada Triwulan III menjadi 10 sertifikat pada Triwulan IV. Hal ini menunjukkan adanya percepatan permintaan dan penyelesaian layanan teknis seiring meningkatnya kesadaran pelaku industri terhadap pemenuhan standar dan regulasi.

Layanan LPH (Pendampingan Sertifikasi Halal) menunjukkan lonjakan yang

sangat signifikan pada Triwulan IV dengan capaian 58 IKM, yang mengindikasikan meningkatnya kebutuhan fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM. Layanan Pelatihan dan Konsultasi masih menunjukkan fluktuasi antar triwulan, namun mengalami peningkatan kembali pada akhir tahun sebagai bagian dari upaya optimalisasi capaian kinerja. Adapun layanan RBPI menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari Triwulan II hingga Triwulan IV, yang mencerminkan meningkatnya pemanfaatan sarana peralatan industri. Sebaliknya, layanan DAPATI dan Verifikasi TKDN belum terealisasi secara optimal dan belum merata sepanjang tahun, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam kesiapan teknis, sosialisasi layanan, serta koordinasi lintas unit dan pemangku kepentingan.

(3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target tujuan.

(4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 adalah penguatan perencanaan layanan tahunan, dengan distribusi target yang lebih proporsional antar triwulan guna mengurangi penumpukan realisasi pada akhir tahun. Peningkatan sosialisasi dan promosi layanan non-pengujian (DAPATI, TKDN, konsultasi, dan pelatihan) kepada pelaku industri dan IKM agar pemanfaatan layanan lebih merata. Optimalisasi koordinasi lintas unit dan pemangku kepentingan, khususnya dalam pelaksanaan layanan sertifikasi, TKDN, dan pendampingan industri. Peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan sarana prasarana, termasuk penjadwalan layanan dan digitalisasi proses pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Penguatan monitoring dan evaluasi triwulanan, sebagai dasar pengambilan keputusan cepat dalam penyesuaian strategi pelaksanaan layanan.

c) IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2025

Indikator ini merupakan indikator baru pada renstra BSPJI Ambon tahun 2025-2029, merupakan indikator yang menghitung kemampuan balai menghasilkan PNBPN dari total aset yang dimiliki. Adapun cara perhitungan RoA adalah sebagai berikut menghitung PNBPN layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun dikalikan 100%

(1) Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan

realisasi sebesar 100%. Adapun rencana kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target ini adalah

- Telah dilakukan pemantauan dan penertiban BMN
- Telah dilakukan inventarisasi barang BMN
- Tersedianya RKBMN TA 2027
- Melakukan Monitoring PNBPN
- Melakukan Perhitungan Nilai ROA TW I-III

(2) Analisis hasil yang telah dicapai

Total nilai aset akhir tahun diperoleh dari nilai aset tercatat setelah dikurangi komponen aset tertentu sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset yang berlaku. Data keuangan yang digunakan dalam perhitungan ROA disajikan pada Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3. 15 Tabel Uraian Nilai Aset dan PNBPN tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Total Nilai Aset Gabungan	57.889.249.647
2	Pengurang Nilai Aset	
	a. Aset Tanah	11.961.295.000
	b. Aset Bangunan	14.315.016.750
3	Total Nilai Aset Akhir Tahun	31.612.937.897
4	PNBPN Layanan Jasa Tahun Berjalan	1.248.776.737

Berdasarkan data sebagaimana disajikan pada Tabel 3.14, diperoleh hasil perhitungan Return on Asset (ROA) sebagai berikut: $ROA = (Rp1.248.776.737 \div Rp31.612.937.897) \times 100\% = 0.039$.

Nilai ROA sebesar **3,95%** menunjukkan bahwa setiap Rp100 nilai aset yang dikelola mampu menghasilkan PNBPN layanan jasa sebesar Rp3,95. Capaian ini mengindikasikan bahwa aset instansi telah dimanfaatkan untuk mendukung perolehan penerimaan negara, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset melalui optimalisasi layanan dan peningkatan kapasitas pemanfaatan aset yang tersedia

(3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target tujuan.

(4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 pentingnya

melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjangkau pelanggan menggunakan jasa layanan yang dimiliki oleh BSPJI Ambon. BSPJI Ambon melakukan promosi yang lebih intens untuk peningkatan jumlah layanan, serta melakukan peningkatan kompetensi pegawai maupun Layanan untuk mendukung pelayanan yang prima.

3. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang Profesional.

SK 6.3 memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu

- a) IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,30 pada tahun 2025 dan terrealisasi sebesar 74,93 dengan persentase capaian adalah 92,16%.

Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.3

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
TJ	Terwujudnya SDM yang Profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,30	74,93	92,16%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							92,16%

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada sasaran kegiatan 6.3 akan dijelaskan sebagai berikut:

(1) Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan realisasi sebesar 100%. Indikator "rata-rata indeks profesionalitas ASN " belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Ketidakberhasilan indikator ini disebabkan dari beberapa aspek penilai memiliki nilai yang sangat kecil.

(2) Analisa Hasil yang telah dicapai

Dasar perhitungan IPASN Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Prof

esionalitas Aparatur Sipil Negara. Pada tahun 2025 jumlah pegawai yang di nilai adalah 40 orang dengan komposisi nilai sebagai berikut: Kualifikasi,

Kompetensi, Kinerja dan Disiplin dengan batas nilai ideal adalah 100.

Tabel 3. 17 Perbandingan Nilai Realisasi dengan Nilai Maksimal

Komposisi Penilaian	Nilai Realisasi	Nilai Maksimasi	Persentase Capaian
Kualifikas	21,25	25	85,00%
Kompetensi	23,68	49	59,20%
Kinerja	25,00	30	83,33%
Disiplin	5,00	5	100%

Dari Tabel 3.16 Dimensi Kompetensi menempati nilai persentase capaian adalah 59,20%. Sesuai PermenPANRB 38/2018 dan Peraturan BKN 8/2019, kompetensi ASN dinilai dari:

- Kompetensi teknis
- Kompetensi manajerial
- Kompetensi sosial kultural

Penyebab utama nilai rendah (berdasarkan aturan) adalah belum seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun (diklat, pelatihan teknis/manajerial), hasil uji kompetensi belum tersedia atau belum mutakhir, ketidaksesuaian kompetensi dengan jabatan (*job-person mismatch*) dan keterbatasan dokumentasi pengembangan kompetensi dalam SIMPEG/BKN

(3) Kendala

Kegiatan diklat banyak difokuskan untuk kegiatan teknis dibandingkan dengan kegiatan administrasi. Serta terbatasnya lembaga diklat/penyedia diklat di daerah

(4) Tindak Lanjut

Secara keseluruhan, hasil pengukuran IPASN Mandiri Tahun 2025 menunjukkan bahwa aspek disiplin dan kinerja ASN telah berada pada kategori baik, sedangkan aspek kompetensi masih memerlukan perhatian dan peningkatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas IPASN pada tahun berikutnya akan difokuskan pada penguatan pengembangan kompetensi ASN melalui perencanaan pelatihan yang terarah, pemenuhan hak pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun, serta penguatan sistem manajemen talenta dan pemetaan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

4. SK 6.4 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik.

SK 6.4 memiliki 3 (tiga) indikator kinerja program yaitu :

- Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI
- Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Indikator Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 20% dan terrealisasi sebesar 14,29% dengan persentase capaian sebesar 71,45%. Indikator Persentase Tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) pada tahun 2025 ditargetkan 77% dan terrealisasi sebesar 44,54% dengan persentase capaian sebesar 57,85%. Indikator indeks 4,24 dengan persentase capaian sebesar 117,18%. Nilai rataan realisasi indikator indikator pada sasaran kegiatan 6.4 sebesar 82,36%.

Tabel 3. 18 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.4

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
SK.6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20	14,29	71,45%
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77	44,545	57,85%
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,6	4,24	117,78%
Nilai rataan realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						82,36%	

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada sasaran kegiatan 6.4 akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) IKK 6.4.1 Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI.

Indikator ini merupakan indikator baru dari renstra BSPJI Ambon 2025-2029. Cara perhitungan indikator ini adalah menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

(1) Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan realisasi sebesar 100%. Indikator " Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI" belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

(2) Analisa hasil yang telah dicapai

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi melalui Application Programming Interface (API) dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Bimbingan dan Pendampingan Teknis (D), dan Konsultasi (E) pada 24 UPT.

Dari total 7 (tujuh) layanan BSPJI Ambon, layanan yang telah terintegrasi adalah layanan pengujian melalui mekanisme API.

(3) Kendala

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan SDM di BSPJI Ambon untuk mengintegrasikan smart office dengan aplikasi yang dimiliki oleh BSKJI.

(4) Tindak Lanjut

BSPJI Ambon perlu melakukan langkah perbaikan kinerja dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, khususnya terkait integrasi sistem informasi layanan dan pemanfaatan Application Programming Interface (API). Upaya ini perlu didukung melalui pelatihan teknis, pendampingan dari BSKJI, serta penetapan personel penanggung jawab sebagai focal point integrasi sistem guna memastikan keberlanjutan pengelolaan integrasi data. Selain itu, diperlukan perencanaan integrasi data layanan secara bertahap dan terukur dengan menyusun rencana aksi integrasi layanan yang mencakup layanan sertifikasi, kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis, serta konsultasi. Pelaksanaan integrasi secara bertahap diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan implementasi akibat keterbatasan sumber daya dan kesiapan sistem. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja, BSPJI Ambon juga perlu melakukan penyelarasan dan evaluasi berkala terhadap sistem internal yang digunakan dengan sistem informasi BSKJI, termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) integrasi data layanan. Monitoring dan evaluasi secara periodik atas pelaksanaan integrasi data layanan perlu dilakukan agar capaian indikator pada tahun berikutnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola layanan jasa industri.

b) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2024, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

(1) Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan realisasi sebesar 100%. Indikator “ Persentase Indeks Pelayanan Publik” adalah satu-satunya indikator dari SK 6.4 yang mampu mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi nilai 4,24 indeks (A-) kategori sangat baik.

(2) Analisa hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2025, penilaian indeks layanan publik dilakukan berdasarkan self assessment dan dilakukan berdasarkan Permenpan RB No.29 Tahun 2022. Hasil Aessmet Index Pelayanan Publik BSPJI Ambon Tahun 2024, mendapatkan nilai seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.18

Tabel 3. 19 Hasil Penilaian Indeks Layanan Publik BSPJI Ambon Tahun 2025

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	4,41	24%	1,06
2	Profesionalisme SDM	4,30	25%	1,08
3	Saranan dan Prasarana	4,45	18%	0,80
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	4,10	11%	0,45
5	Konsultasi dan Pengaduan	4,20	10%	0,42
6	Inovasi	4,00	12%	0,48
Nilai Minimal Indeks Pelayanan Publik				4,24

Dengan indeks layanan publik sebesar 4,24 maka Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Range Nilai 4,01 sd 5,00 yaitu kategori **A-** dengan **Sangat Baik** sesuai kategori yang ditunjukkan pada Tabel 3.19

Tabel 3. 20 Kategori Nilai Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan	
0 - 1,00	1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	1,01	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,51 - 2,00	1,51	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	2,01	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	2,51	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	3,51	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	4,01	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangandibeberapa indikator.
4,51 - 5,00	4,51	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.

Perkembangan nilai indeks layanan publik selama TA 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Perbandingan nilai indeks layanan publik oleh satker 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Perkembangan Indeks Layanan Publik	B-	A-	A-	B	A-

Dimulai dari tahun 2021, perhitungan dilakukan secara *self assessment* mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017. Kemudian pada tahun 2022 terdapat perubahan peraturan untuk penilaian evaluasi layanan publik yaitu berdasarkan Permenpan RB No.29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Secara keseluruhan, BSPJI Ambon mengalami peningkatan indeks pelayanan publik dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Nilai Indeks Pelayanan Publik BSPJI Ambon pada tahun 2021 ialah B- yang termasuk ke kategori baik dengan catatan. Tahun 2022 Indeks Pelayanan Publik BSPJI Ambon A- dengan Kategori Sangat Baik. Kategori pada tahun 2022 dan 2023 tetap sama, yaitu A-, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan dalam nilai indeks pelayanan publik, yaitu dari

4,21 menjadi 3,76. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan kembali nilai indeks pelayanan publik menjadi 4,24

Jika dibandingkan dengan balai lain pada tahun 2024, BSPJI Ambon menempati posisi terendah dalam indeks pelayanan public hal ini sesuai data yang dirilis oleh bagian kehumasan BSKJI. Namun pada tahun 2025 BSPJI Ambon mampu melampaui balai lainnya

No	Satker BSKJI	Hasil PEKPPP	Nilai	Kategori
1	BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan	4,55	A	Pelayanan Prima
2	BBSPJI Agro	4,35	A-	Sangat Baik
3	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	4,12	A-	Sangat Baik
4	BBSPJI Logam dan Mesin	4,45	A-	Sangat Baik
5	BBSPJI Tekstil	4,66	A	Pelayanan Prima
6	BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam	4,7	A	Pelayanan Prima
7	BBSPJI Selulosa	4,22	A-	Sangat Baik
8	BBSPJI Kerajinan dan Batik	4,23	A-	Sangat Baik
9	BBSPJI Kulit, Karet, dan Plastik	4,23	A-	Sangat Baik
10	BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri	4,95	A	Pelayanan Prima
11	BBSPJI Hasil Perkebunan Mineral Logam dan Maritim	4,71	A	Pelayanan Prima
12	BSPJI Aceh	4,78	A	Pelayanan Prima
13	BSPJI Medan	4,38	A-	Sangat Baik
14	BSPJI Pekanbaru	4,53	A	Pelayanan Prima
15	BSPJI Padang	4,55	A	Pelayanan Prima
16	BSPJI Palembang	4,82	A	Pelayanan Prima
17	BSPJI Lampung	4,12	A-	Sangat Baik
18	BSPJI Jakarta	3,68	B	Baik
19	BSPJI Surabaya	4,57	A	Pelayanan Prima
20	BSPJI Pontianak	4,58	A	Pelayanan Prima
21	BSPJI Banjarbaru	4,91	A	Pelayanan Prima
22	BSPJI Samarinda	4,73	A	Pelayanan Prima
23	BSPJI Manado	4,14	A-	Sangat Baik
24	BSPJI Ambon	4,24	A-	Sangat Baik

Namun dari tahun 2021-2025 indikator kinerja indeks pelayanan publik **berhasil** dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

(3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran VII

(4) Tindak lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 pentingnya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjangkau pelanggan menggunakan jasa layanan yang dimiliki oleh BSPJI Ambon. BSPJI Ambon melakukan promosi yang lebih intens untuk peningkatan jumlah layanan, serta melakukan peningkatan kompetensi pegawai maupun Layanan untuk mendukung pelayanan yang prima

5. SK 6.5 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien.

SK 6.5 memiliki 2 (dua) indikator kinerja program yaitu

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker
- Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan).

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 60% dan terrealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 166,67%. Indikator Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) pada tahun 2025 ditargetkan 70,1% dan terrealisasi sebesar 72,1% dengan persentase capaian sebesar 102,85%. Nilai rataan realisasi indikator indikator pada sasaran kegiatan 6.5 sebesar 134,76%.

Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.5

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
SK.6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	60	100	166,67%
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	70,1	72,1	102,85%
Nilai rataan realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						134,76%	

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **telah berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada sasaran kegiatan 6.4 akan dijelaskan sebagai berikut:

a) **IKK 6.5.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker.**

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60, Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud

(1) Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan realisasi sebesar 100%. Indikator ini mampu mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi nilai 100%.

(2) Analisa hasil yang telah dicapai

Team Inspektorat melakukan tindak pengawasan di BSPJI Ambon tanggal 14-18 Juli 2025. Beberapa temuan dari inspektorat adalah 1. Kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan layanan publik (telah ditindaklanjuti) 2. Kelemahan

dalam penanganan dokumen pemeliharaan (telah ditindaklanjuti) 3. Kelemahan dalam pencatatan persediaan obat-obatan (telah ditindaklanjuti) 4. Kelemahan dalam penanganan dokumen pengadaan barang dan jasa (telah ditindaklanjuti) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada BSPJI Ambon TA. 2024 telah disampaikan melalui Surat Nomor R/174/IJ-IND/PW/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025.

Output kegiatan yang mendukung indikator ini **Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker** terlaksana adalah dengan ditetapkannya BSPJI Ambon menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pada tahun 2025 BSPJI Ambon telah mendapatkan predikat WBK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 5405 Tahun 2025.

(3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran kegiatan 6.5

(4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 pentingnya peningkatan koordinasi antar team dan BSPJI Ambon untuk menyelesaikan temuan

b) IKK 6.5.2 Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan).

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,1. Indikator ini merupakan indikator baru dalam renstra BSKJI 2025-2029. Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.

(1) Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan

realisasi sebesar 100%. Indikator ini mampu mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi nilai 72,1 dari target yang ditetapkan yaitu 70,1.

(2) Analisa hasil yang telah dicapai

Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pada tahun 2025 merujuk pada Nota Dinas Sekretariat jenderal Nomor 855/SJ-IND.6/KR/XII/2025 nilai unit kearsipan satker daerah pada nilai 72,10 dan untuk nilai unit pengolahan satker daerah 80,80.

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
9	BSPJl Palembang (UK)	93.97
10	BSPJl Palembang (UP)	94.70
11	BSPJl Samarinda (UK)	100
12	BSPJl Samarinda (UP)	94.78
13	BSPJl Pontianak (UK)	81.47
14	BSPJl Pontianak (UP)	70.44
15	BSPJl Banjar Baru (UK)	91.60
16	BSPJl Banjar Baru (UP)	84.25
17	BSPJl Pekanbaru (UK)	93.97
18	BSPJl Pekanbaru (UP)	92.33
19	BSPJl Jakarta (UK)	94.27
20	BSPJl Jakarta (UP)	87.11
21	BSPJl Manado (UK)	97.80
22	BSPJl Manado (UP)	80.25
23	BSPJl Ambon (UK)	72.10
24	BSPJl Ambon (UP)	80.80
25	BSPJl Banda Aceh (UK)	91.00
26	BSPJl Banda Aceh (UP)	84.55
C Politeknik		
1	Politeknik STMI Jakarta (UK)	62.70
2	Politeknik STMI Jakarta (UP)	76.80
3	Politeknik APP Jakarta (UK)	83.40
4	Politeknik APP Jakarta (UP)	83.47
5	Politeknik AKA Bogor (UK)	92.10

Beberapa kegiatan dilakukan untuk mendukung agar indikator kegiatan ini bisa berhasil salah satunya yaitu pendampingan Kearsipan, memperlengkapi kearsipan.



(3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran kegiatan 6.5

(4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 pentingnya peningkatan kearsipan untuk mencapai target.

6. SK 6.6 Terwujudnya Akuntabilitas organisasi.

SK 6.6 memiliki 3 (tiga) indikator kinerja:

- IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
- IKK 6.6.2 Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Indikator Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 79,5 dan terrealisasi sebesar 82,1 dengan persentase capaian sebesar 103,27%. Indikator Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun

2025 ditargetkan 94 dan terrealisasi sebesar 88,03 dengan persentase capaian sebesar 93,65%. Indikator Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan pada tahun 2025 ditargetkan 75 dan terrealisasi sebesar 94,25 dengan persentase capaian sebesar 125,67%. Nilai rata-ran realisasi indikator indikator pada sasaran kegiatan 6.6 sebesar 107,53%.

Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.6

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
SK.6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi.	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,5	82,1	103,27%
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94	88,03	93,65%
			Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75	94,25	125,67%
Nilai rata-ran realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						107,53%	

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **telah berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada sasaran kegiatan 6.6 akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
Pada tahun 2025, indikator ini ditarget sebesar 79,5. Realisasi capaian pada tahun ini masih belum dilaksanakan karena penilaian SAKIP belum berlangsung. Nilai Realisasi SAKIP tahun 2024 Satker adalah 82,1 berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini masih belum bisa diputuskan apakah indikator ini telah **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

(1) Hasil yang dicapai

Penilaian SAKIP TA. 2024 BSPJI Ambon oleh Inspektorat Jenderal III dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2024 secara *offline*. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai, mulai dari 0 s.d. 100 berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Hasil Penilaian SAKIP tahun 2024, BSPJI Ambon memperoleh nilai 82,10 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 24 Rincian Penilaian terhadap komponen pekerjaan

No	Komponen Penilaian	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24,60
2	Pengukuran Kinerja	25,20
3	Pelaporan Kineja	12,30

No	Komponen Penilaian	Nilai
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal satker	20,00
Total		82,10

(2) Analisa hasil yang dicapai

Perkembangan nilai minimal akuntabilitas kinerja TA 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Perbandingan nilai minimal akuntabilitas kinerja oleh satker 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Perbandingan nilai minimal akuntabilitas kinerja	76,45	73,95	77,15	82,10	N/A

Dari tahun 2021-2024, realisasi nilai minimal akuntabilitas kinerja memiliki tren yang dinamis. Penilaian SAKIP pada tahun 2021-2024 menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Pada tahun 2022, dilakukan penilaian SAKIP yang mengacu pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana perubahan acuan peraturan penilaian SAKIP tersebut mengakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dibandingkan dengan penilaian pendahulunya, sehingga nilai SAKIP di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, BSPJI Ambon memperoleh nilai sebesar 76,45 dengan rincian penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja sebesar 22,80; pengukuran kinerja sebesar 23,10; pelaporan kinerja sebesar 10,80; evaluasi kinerja sebesar 19,75. Nilai pencapaian kinerja BSPJI Ambon di tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 walaupun tidak signifikan. Namun pada tahun-tahun berikutnya nilai akuntabilitas kinerja mempunyai trend yang naik.

(3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran kegiatan 6.6

(4) Tindak lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 adalah Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan ketua tim untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam internal timnya sehingga semua kegiatan

dapat berjalan dan mencapai target kinerja, memberikan pelatihan dan bimtek kepada para penyusun SAKIP serta melakukan reviu terhadap dokumen laporan kinerja sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.

b. IKK 6.6.2 Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 94. Indikator ini merupakan indikator baru dalam renstra BSKJI 2025-2029. Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

(1) Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2025 target fisik dari indikator ini adalah 100% dan realisasi sebesar 100%. Indikator ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi nilai 88,03 dari target yang ditetapkan yaitu 94.

(2) Analisa hasil yang telah dicapai

Perhitungan IKPA merujuk pada peraturan dari Kementerian Keuangan. Adapun tabel 3.25 menjelaskan capaian IKPA selama periode TA 2025.

Tabel 3. 26 IKPA BSPJI Ambon TA 2025

Bulan	Nilai
Januari	98,33
Februari	100
Maret	100
April	80
Mei	77,9
Juni	80,39
Juli	91,45
Agustus	92,6
September	92,59
Oktober	92,9
November	92,68
Desember	87,99
Rata-rata nilai IKPA	88,03

Selama Tahun Anggaran berjalan, capaian Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencatat rata-rata sebesar 88,03, yang menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran secara umum berada pada kategori baik. Kinerja sangat optimal pada awal tahun, dengan capaian mendekati sempurna pada Januari hingga Maret, mencerminkan kesiapan perencanaan dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran.

Namun demikian, terjadi penurunan capaian pada Triwulan II, khususnya pada April hingga Juni, sebelum kembali membaik dan stabil pada semester II. Penurunan kembali pada bulan Desember masih dalam batas wajar dan umumnya dipengaruhi oleh dinamika penyelesaian kegiatan dan administrasi akhir tahun. Secara keseluruhan, tren perbaikan pada paruh kedua tahun menunjukkan adanya upaya pengendalian dan evaluasi yang efektif dalam pelaksanaan anggaran.

(3) Kendala

Kendala yang dialami dalam pencapaian target IKPA disebabkan oleh keterlambatan realisasi kegiatan, penyesuaian jadwal pelaksanaan, serta belum optimalnya pengelolaan komitmen dan pembayaran. Fluktuasi akhir tahun dipengaruhi oleh tingginya volume penyelesaian administrasi keuangan, revisi minor anggaran, dan konsolidasi pertanggungjawaban. Serta adanya Ketergantungan pada proses administratif tertentu (pengadaan, verifikasi dokumen, dan pencairan) yang memerlukan waktu relatif lebih lama pada periode tertentu

(4) Tindak lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 adalah peningkatan koordinasi antara perencana, pelaksana kegiatan, dan pengelola keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap indikator IKPA.

(3) IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75. Indikator Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan. Indikator ini menghitung Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan di unit Eselon I BSKJI.

(1) Hasil yang telah dicapai

Realisasi capaian pada tahun 2025 masih belum dilaksanakan karena penilaian dan analisis laporan keuangan belum berlangsung. Nilai Laporan Keuangan tahun 2024 adalah 94,25. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini masih belum bisa diputuskan apakah indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan

(2) Analisa hasil yang telah dicapai

Perkembangan nilai minimal laporan keuangan TA 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Perbandingan nilai minimal laporan Keuangan 2021-2025

Indikator Kinerja	Realiasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Perbandingan nilai minimal laporan keuangan	88	98	98,75	94,25	N/A

Dari tahun 2021-2025, realisasi nilai minimal Laporan Keuangan memiliki tren kenaikan namun pada tahun 2024 mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena Nilai LK turun karena adanya pengurangan point penilaian yg disebabkan per 31 Desember 2024 masih terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran yg terlambat disetorkan, terdapat nilai aset dan persediaan yang tidak di detailkan dan di *approve* tepat waktu, adanya temuan BPK Atas audit keuangan TA2024 yang menimbulkan TGR.

(3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran.

(4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 agar tercapai tujuan hingga tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan ketua tim untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam internal timnya sehingga semua kegiatan dapat berjalan dan mencapai target kinerja.

7. SK 6.7 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri.

SK 6.7 memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Indikator ini ditargetkan sebesar pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 75 dan terrealisasi sebesar 89,52 dengan persentase capaian sebesar 119,36%.

Tabel 3. 28 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Sasaran Kegiatan 6.7

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SK.6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	Nilai	79,5	89,52	119,36%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						119.36%

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **telah berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada sasaran kegiatan 6.7 akan dijelaskan sebagai berikut:

(1) IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 79,5. Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian

(1) Hasil yang telah dicapai

Target yang ditetapkan pada indikator ini adalah 79,5 realisasi capaian pada tahun 2025 adalah 89,52 dengan persentase capaian adalah 119,36 Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan

(2) Analisa hasil yang telah dicapai

Cara Hitung nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$ Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. Pada tahun 2025 Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih adalah adalah Rp2.114.679.009, total P3DN Rp1.893.044.664 maka nilai PDN adalah 89,2%.

Perkembangan Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker TA dapat dilihat pada tabel 3.28

Tabel 3. 29 Perbandingan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa 2021-2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
Perbandingan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	100%	216%	158%	55,68%	89,2%

Pada tahun 2022 persentase capaian P3DN mampu menembus angka prosentase capaian adalah 216%. Tahun 2023 persentase capaian P3DN adalah 158%. Terjadinya penurunan persentase nilai capaian P3DN dibanding tahun 2022. Tahun 2023 persentase capaian P3DN adalah 158%. Pada tahun-tahun sebelumnya P3DN mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjakan, namun pada tahun 2024 target tidak bisa tercapai dikarenakan adanya pembelian alat AAS sebesar Rp1.770.000.000 pada Triwulan III yang menyebabkan nilai import yang lebih besar. Pada tahun 2025, persentase capaian P3DN bisa memenuhi target adalah 89,2%

(3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran.

(4) Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah melakukan maksimalisasi terhadap belanja barang yang merupakan akun-akun terpilih. Melakukan Back up data perhitungan riil PDN +TKDN sesuai data SAKTI

3.1.4 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (2025-2029)

Pada tahun 2022 perjanjian kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon meliputi 7 (tujuh) sasaran kegiatan untuk melaksanakan kinerja yaitu:

:

- Sasaran Kegiatan 6.1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional
- Sasaran Kegiatan 6.2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri
- Sasaran Kegiatan 6.3 : Terwujudnya SDM yang Profesional
- Sasaran Kegiatan 6.4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik
- Sasaran Kegiatan 6.5 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- Sasaran Kegiatan 6.6 : Terwujudnya Akuntabilitas organisasi
- Sasaran Kegiatan 6.7 : Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

Untuk capaian kinerja kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon selama kurun waktu 2025-2029 berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian ditunjukkan tabel 3.35 berikut:

Tabel 3. 30 Capaian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/	Satuan	Baseline (2024)	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
		Indikator Kinerja Kegiatan			Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi s//d 2025	%
TJ	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional												
	IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	80	80	93,67	117,09%	81	82	83	84	82	75,015	91,48%
	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	40	40	76,56	191,40%	41	42	43	45	45	76,56	170,13%
	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri												
	IKK 6.2.1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	iindeks	621.000.000	2	5	250,00%	3	4	4	4	4	5	125,00%
	IKK 6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	170	179	808	451,40%	205	220	235	250	218	808	370,98%
	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	0.02	0,02	0,039	195,00%	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,039	121,88%
	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional												
	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	76,8	81,30	74,93	92,16%	81,4	81,5	81,6	81,7	81,7	74,93	91,71%
	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik												
	IKK 6.4.1	Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI	%	0	20	14,29	71,45%	40	60	80	100	60	14,29	23,82%
	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	-	77	44,545	57,85%	78	80	83	85	80,6	44,545	55,27%
	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,6	3,6	4,24	117,78%	3,9	3,95	4,01	4,04	4,04	4,24	104,95%
	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien												
	IKK 6.5.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker	%	-	60	100	166,67%	62	65	67	70	65	100	154,32%
	IKK 6.5.2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan)	Nilai	18,5	70,1	72,1	102,85%	73	76	79	82	82	72,1	87,93%
SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi													

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/	Satuan	Baseline (2024)	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
		Indikator Kinerja Kegiatan			Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi s//d 2025	%
	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	77,15	79,5	82,1	103,27%	79,5	79,7	79,7	80	80	82,1	102,63%
	IKK 6.6.2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	93,82	94	88,03	93,65%	94	94,5	94,5	94,8	94,8	90,57	95,54%
	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75	94,25	125,67%	75,25	75,5	75,75	76	76	94,35	124,14%
	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri												
	IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	%	61,07	75	89,52	119,36%	76	78	79	81	78	89,52	115,06%

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Kegiatan BSPJI Ambon Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan dari APBN yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 Nomor SP DIPA-019.07.2.248145/2025 dengan jumlah pagu awal anggaran Rp9.358.210.000,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp8.650.270.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp707.940.000,- dengan rincian :

1. Rupiah Murni : Rp8.650.270.000

2. PNBP : Rp707.940.000

Dalam anggaran DIPA BSPJI Ambon terdapat :

1. Pagu Efektif : Rp. 8.719.428.000

2. Pagu Blokir : Rp. 638.782.000

Komposisi Anggaran kegiatan BSPJI Ambon berdasarkan jenis belanja dijelaskan seperti pada tabel 3.36.

Tabel 3. 31 Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1	Belanja Pegawai	5.650.270.000
2	Belanja Barang	3.666.440.000
3	Belanja Modal	41.500.000

Sejak di tetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 Nomor SP DIPA- 019.07.2.248145/2025 dengan jumlah pagu awal anggaran **Rp9.358.210.000,-** (sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sepuluh rupiah)BSPJI Ambon telah melakukan revisi sebanyak 15 (lima belas) kali dalam dalam kurun waktu dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV yaitu :

Tabel 3. 32 Rincian Revisi DIPA BSPJI Ambon TA 2025

No	Uraian	Tanggal	PAGU			Keterangan
			AWAL	AKHIR	BLOKIR	
1	2	3	4	5	6	7
	DIPA 0	29-Nov-24	Rp 9,358,210,000	9,358,210,000		Awal
1	DIPA 1	21-Feb-25	Rp 9,358,210,000	9,358,210,000	Rp 1,116,218,000.00	Blokir penggunaan Anggaran sebesar Rp 1.116.218.000 berdasarkan Nota Dinas No. 105/BSKJI/PR/II/2025 tanggal 17 Februari 2025
2	DIPA 2	21-Apr-25	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Relaksasi Blokir A Anggaran BSKJI TA 2025 berdasarkan Nota Dinas No. 239/BSKJI/PR/IV/2025 tanggal 14 April 2025

No	Uraian	Tanggal	PAGU			Keterangan
			AWAL	AKHIR	BLOKIR	
1	2	3	4	5	6	7
3	DIPA 3	28-May	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Perubahan catatan Halaman IV.A (Blokir)
4	DIPA 4	11-Jun	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Pergeseran Anggaran antar Program
5	DIPA 5	13-Jun	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000	Rp 1,589,739,000	Revisi Relaksasi Anggaran
6	DIPA 6	14-Jul	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Perubahan halaman III DIPA
7	DIPA 7	22-Aug	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000	Rp85,967,000	Relaksasi Blokir A Anggaran BSKJI TA 2025 Tahap II berdasarkan Nota Dinas No. 3086/BSKJI/PR/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025
8	Satker 2	25-Aug	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Revisi POK dan Halaman III DIPA
9	Satker 3	15-Sep	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Revisi POK dan Halaman III DIPA
10	DIPA 8	30 Sep	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Percepatan Realisasi (Pemutakhiran KPA)
11	DIPA 9	2 Oct	Rp 9,358,210,000	Rp 9,358,210,000		Revisi POK dan Halaman III DIPA
12	DIPA 10	14 Oct	Rp 9,358,210,000	Rp10,385,687,000		Revisi Anggaran Penambahan Pagu PNPB
13	DIPA 11	14 Nov	Rp10,385,687,000	Rp10,450,837,000		Revisi Anggaran Penambahan Pagu PNPB
14	DIPA 12	4 Dec	Rp10,450,837,000	Rp10,705,593,000		Revisi Anggaran Penambahan Pagu PNPB
15	Satker 4	10 Dec	Rp10,705,593,000	Rp10,705,593,000		Revisi POK dan Halaman III DIPA
16	DIPA 13	31 Dec	Rp10,705,593,000	Rp10,705,593,000		Revisi Pemutakhiran KPA
17	DIPA 14	31 Dec	Rp10,705,593,000	Rp10,705,593,000		Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai

Realisasi keuangan BSPJI Ambon tahun 2025 adalah sebesar 99,52%. Bila dibandingkan dengan capaian Tahun Anggaran sebelumnya (99,84%), terdapat kenaikan sebesar 2,98 %. Rincian realisasi keuangan BSPJI Ambon selama 7 (tujuh) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.32.

Tabel 3. 33 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran dari Tahun 2019-2025

Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
2019	12.840.915.000	12.192.027.410	94,95%
2020	11.520.090.000	10.265.552.199	89,11%
2021	14.072.443.000	13.388.522.270	95,14%
2022	9.960.918.000	9.767.676.191	98,06%
2023	10.957.628.000	10.939.745.181	99,84%
2024	15.817.388.000	15.286.046.967	96,64%
2025	9.358.210.000	9.308.965.092	99,52%

Realisasi keuangan BSPJI Ambon berdasarkan kegiatan Renstra TA 2025 dapat dijelaskan dalam tabel 3.39

Tabel 3. 34 Realisasi Keuangan BSPJI Ambon TA 2025

Komponen/ Subkomponen/		Pagu Total	Realisasi	%Dari Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Dari Pagu Efektif
1		2	3	4	Rp5	6	7
EC							
AEC.002.051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	93.298.000	86.164.090	98,57%		93.298.000	98,57
AEF.001.051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	3.940.000	3175000	80.58 %		3.175.000	80.58 %
BAD.001.051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	239.933.000	232.190.450	96.77 %		239.933.000	96.77 %
BAD.024.051	Jasa pelayanan teknis Kalibrasi	-	Rp0,00	99,74%		-	99,74%
BAD.024.052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	6.500.000	Rp6.500.000	100,00%		6.500.000	100,00%
BAD.036.052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	23.387.000	23.265.750	99,48%		23.387.000	47,56%
BAD.047.051	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	257.927.000	257570125	99.86 %		257.927.000	99.86 %
BAD.075.051	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	36.516.000	33600860	92.02%		36.516.000	92.02%
CAH.021.051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	176.866.000	176624225	99.86%		176.866.000	99.86%

Komponen/ Subkomponen/		Pagu Total	Realisasi	%Dari Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Dari Pagu Efektif
1		2	3	4	Rp5	6	7
EBA.958.054	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/Pameran/Publikasi Layanan Teknis	8.922.000	8819250	98.85%		8.819.250	99,85%
EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	6.662.267.000	6654282940	99,88%		6.662.267.000	99,88%
EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.735.856.000	1.725.111.229	99.38%	1.266.744.000	1.735.856.000	99.38%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	41.500.000	-	-	41.500.000	-	-
EBC.996.051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	102.359.000	95447173	93.25%		95.447.173	93.25%
EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	2.000.000	1918000	95.90 %	7.772.000	1.918.000	95.90 %
EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000	935.000	93,50%		1.000.000	935.000
EBD.955.051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	1.000.000	999.000	99,99%		999.000	99,99%
EBD.961.051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	2.400.000	2362000	98.42%	35.406.000	2.400.000	98.42%
Total		Rp10.689.958.423,00	Rp9.308.965.092,00		Rp1.343.650.000	Rp9.346.308.423	

3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM)

1) Hasil Yang telah Dicapai

Realisasi keuangan Rupiah Murni berdasarkan Rencana Strategis BSPJI Ambon TA. 2024 adalah seperti terlihat pada Tabel 56.

Tabel 3. 35 Realisasi Keuangan Rupiah Murni Berdasarkan Jenis Belanja

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	6.662.267.000	3.830.825.000	212.501.000
Realisasi	6.653.883.939	2.482.777.927	170.999.225
Persentase Realisasi	99,87	64,81	80,47
Persentase Rataan	99,52%		

1) Analisis hasil yang telah dicapai

Realisasi keuangan yang ditetapkan oleh BSKJI adalah 99% dari persentase rataan realisasi dana Rupiah Murni adalah 96,88% dari tabel 56 tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran Rupiah Murni **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan. Dari sumber dana Rupiah Murni pada jenis belanja Pegawai terrealisasi sebesar 99,87%. Pembiayaan dari rupiah murni ini digunakan untuk layanan perkantoran seperti : pembayaran gaji dan tunjangan PNS/P3K.

Realisasi keuangan dari sumber dana rupiah murni pada jenis belanja Barang terrealisasi sebesar 64,81%. Realisasi dari jenis belanja barang ini adalah berupa belanja bahan untuk promosi layanan publik, Pembuatan Video Pelayanan Publik, belanja perjalanan dinas, belanja pemusnahan bahan kimia, belanja penambah daya tahan tubuh, perawatan gedung kantor seperti pengecatan, perawatan sarana kantor, operasional perkantoraan dan pimpinan.

Realisasi Keuangan dari Sumber dana Rupiah Murni pada jenis belanja Modal terrealisasi sebesar 80,47%. Realisasi dari jenis belanja modal ini adalah berupa Air Quality Monitor Detector, Flow Meter 694,000, CO Meter, Alat pengukur Emisi bergerak Sofa

2) Kendala

Realisaasi anggaran tersebut belum mencapai target antara lain disebabkan oleh: a) Perencanaan realisasi anggaran yang belum maksimal dilakukan; b) Penanggungjawab kegiatan masih lambat dalam melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya; c) kurangnya koordinasi.

4) Tindak Lanjut

Untuk memaksimalkan pencapaian realisasi anggaran tahun 2025, maka perencanaan yang optimal perlu dilakukan dan melakukan koordinasi antar bagian sehingga tujuan bisa tercapai.

3.2.2 Realisasi Anggaran Keuangan PNBP/BLU

1) Hasil Yang dicapai

Target Penerimaan PNBP Tahun 2025 adalah indeks 2 dengan baseline tahun 2024 Rp 621.000.000 Dari target yang ditetapkan, BSPJI Ambon mampu melebihi target yang di tetapkan dengan mencapai penerimaan PNBP sebesar Rp1.248.776.737 Untuk target penggunaan PNBP pada tahun 2025 ini adalah sebesar Rp745.200.000 Rincian realisasi keuangan PNBP BSPJI Ambon selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.35

Tabel 3. 36 Rincian Realisasi Keuangan PNBP BSPJI Ambon

Pagu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target penerimaan	450.000.000	400.000.000	408.000.000	428.600.000	450.000.000	621.000.000	621.000.000
Realisasi Penerimaan	246.599.000	246.599.000	260.353.500	587.580.184	474.329.362	4.140.735.636	1.248.776.737
Prosentase	54,80%	63,45%	60,75%	137,09%	105,40%	667%	101,09%
Target Penggunaan	427.500.000	380.000.000	387.000.000	407.170.000	428.984.000	521.999.300	602.370.000
Realisasi Penggunaan	234.269.050	241.103.113	206.985.050	310.648.200	428.843.800	3.149.220.600	1,008,333,348
Prosentase	54,80%	63,45%	53,40%	76,29	99,97%	603,3-0%	167,39%

Pada Tabel 56 dapat dilihat yaitu realisasi anggaran tahun 2025 **mencapai** target yang ditetapkan dengan persentase realisasi adalah 167,39%., realisasi tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2024. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan persentase penerimaan adalah tidak adanya kegiatan DAK seperti pada tahun sebelumnya. Pencapaian penerimaan PNBP yang melebihi target yang ditetapkan mampu membuat semua kegiatan yang bersumberdana dari PNBP bisa di biayai Selain itu, kegiatan dengan sumber dana RM dapat dilaksanakan.

2) Kendala

Secara Kumulatif target PNBP 2025 telah tercapai dengan capaian 101,09% akan tetapi beberapa layanan jasa teknis belum mencapai target yang ditetapkan, diantaranya adalah:

- Layanan Kalibrasi

- Layanan sertifikasi
- Layanan Jasa Konsultansi

3) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2025 bertujuan untuk bias mencapai target di TA 2026 agar :

- kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaring pelanggan menggunakan jasa layanan yang dimiliki oleh BSPJI Ambon.
- BSPJI Ambon melakukan promosi yang lebih intens untuk peningkatan jumlah PNB
- melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana PNB terutama untuk jenis layanan yang belum mencapai target atau targetnya belum memenuhi.
- Penambahan Ruang Lingkup Pelayanan

3.3 Analisis Sumber Efisiensi Sumber Daya Secara Umum

3.3.1 Analisis Efisiensi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja

Tabel 3. 37 Tabel Efisiensi Anggaran

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realiasi	Persentase	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon										
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri									
IK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,63	3,81	104,96%	efektif				efisien
A	Pengujian bahan dan produk						239.516.000	226.140.575	94,42%	
B	Operasional laboratorium kalibrasi (BAD.004)									
C	Jasa pelayanan teknis sertifikasi produk						21.587.000	21.465.750	99,44%	
D	Layanan Teknis Perbengkelan						199.000.000	198.643.125	99,82%	
E	Pemeriksaan produk halal						36.516.000	33.600.860	92,02%	
IK 2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan/ Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	100	349	349%	efektif				
A										
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional									
IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	%	80	93,67	117,09%	tidak efektif				tidak efisien
A	Pengujian bahan dan produk						239.516.000	226.140.575	94,42%	
B	Operasional laboratorium kalibrasi									
C	Jasa pelayanan teknis sertifikasi produk						21.587.000	21.465.750	99,44%	
D	Layanan Teknis Perbengkelan						199.000.000	198.643.125	99,82%	
E	Pemeriksaan produk halal						36.516.000	33.600.860	92,02%	
IKK 6.1.2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	40	76,56	191,40%	efektif				efisien
A	Penjajakan kerjasama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis						93.298.000	86.164.090	92,35%	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realiasi	Persentase	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
B	Pameran/Visualisasi/Publikasi						3.940.000	3.175.000	80,58%	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri									
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	indeksi	2	5	250,00%	efektif				efisien
A	Operasional dan pemeliharaan laboratorium						13.500.000	12.334.000	91,36%	
B	Pengembangan lembaga kalibrasi						6.500.000	6.500.000	100,00%	
C	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk						23.387.000	23.265.750	99,48%	
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	179	808	451,40%	efektif				efisien
	Gaji dan tunjangan PNS						6.662.267.000	6.113.788.950	91,77%	
	Gaji dan tunjangan PPPK						543.646.000	540.493.990	99,42%	
IKK 6.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	0,02	0,039	195,00%	efektif				efisien
	Pengadaan pengolah Data									
	Pengadaan peralatan laboratorium						164.501.000	164.499.225	100,00%	
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional									
IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,3	74,93	92,16	tidak efektif				tidak efisien
	PELATIHAN PENGUJIAN BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD)						34.648.000	30.000.000	86,59%	
	PELATIHAN PENGUJIAN Staphylococcus aureus PADA PRODUK PERIKANAN						13.992.000	13.956.500	99,75%	
	Diklat Conten Kreator						5.091.000	5.091.000	100,00%	
	Diklat kearsipan Online						16.776.000	16.770.973	99,97%	
	Diklat Penyelia Halal						15.700.000	13.800.000	87,90%	
	Pelatihan PPC Fitoplankton						11.352.000	11.028.700	97,15%	
	Pelatihan Teknis Perbengkelan						4.800.000	4.800.000	100,00%	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realiasi	Persentase	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik									
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	20	14,29	71,45%	tidak efektif				tidak efisien
A	Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi									
IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	77	44,545	57,85%	tidak efektif				tidak efisien
A	Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi									
A	Pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi									
IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,6	4,24	117,78%	efektif				efisien
A	Pemeliharaan Gedung Kantor						177.987.000	177.963.700	99,99%	
B	Pemeliharaan Sarana Kantor						186.434.000	177.735.500	95,33%	
C	Pemeliharaan Kendaraan						60.000.000	59.981.525	99,97%	
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
IKK 6.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	60	100	166,67%	efektif				efisien
A	Penerapan SPIP						1.200.000	1.200.000	100,00%	
B	Penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM						1.200.000	1.200.000	100,00%	
IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	70,1	72,1	102,85%	efektif				efisien
A	Penatalaksanaan kearsipan						16.776.000	16.770.973	99,97%	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi									
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,5	82,1	103,27%	efektif				efisien
A	Penyusunan rencana program dan anggaran						1.000.000	950.000	95,00%	
	Penyusunan dan review Renstra 2025-2029						1.000.000	968.000	96,80%	
C	Monitoring dan evaluasi program/kegiatan BSKJI						1.000.000	935.000	93,50%	
IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94	88,03	93,65%	Tidak efektif				Tidak efisien

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realiasi	Persentase	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
A	Pengelolaan Sistem Akutansi Pemerintah dan Barang Milik Negara						1.000.000	999.000	99,90%	
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75	94,25	125,67%	efektif				efisien
A	Pengelolaan Sistem Akutansi Pemerintah dan Barang Milik Negara						1.000.000	999.000	99,90%	
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri									
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	%	75	89,52	119,36%	efektif				efisien
A	Pengadaan alat dan bahan pendukung laboratorium						164.501.000	164.499.225	100,00%	
B	Pengadaan peralatan gelas									
C	Pengadaan bahan kimia dan media mikrobiologi						63.000.000	56.000.000	88,89%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa semua indikator kinerja telah mencapai hasil yang efektif dan dilakukan secara efisien. Namun ada beberapa indikator yang belum mencapai hasil efektif dan efisien yaitu, Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, SPBE dan IKPA.

3.3.2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA

No.	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	PN	Target	Satuan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Jumlah	
						TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO
1	EC-6077-AEC-Kerjasama	002-Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		2	Dokumen	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	1	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.7 %	1	100 %	2
2	EC-6077-AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	001-Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis		25	orang	8 %	2	8 %	2	8 %	2	8 %	2	8 %	2	8 %	2	8 %	2	8 %	2	8 %	2	8 %	2	8 %	2	12 %	3	100 %	25
3	EC-6077-BAD-Pelayanan Publik	001-Jasa pelayanan teknis pengujian		24	Industri	.01 %	0	.01 %	0	30 %	3	11.6 %	1	11.6 %	1	11.7 %	1	11.7 %	2	2.9 %	2	2.9 %	2	5.8 %	2	5.8 %	2	5.98 %	8	100 %	24

No.	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	PN	Target	Satuan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Jumlah			
						TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO
	kepada industri																																
4	EC-6077-BAD-Pelayanan Publik kepada industri	024-Jasa pelayanan teknis kalibrasi		8	Industri	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	12.5 %	1	12.5 %	1	12.5 %	1	12.5 %	1	12.5 %	1	12.5 %	1	12.5 %	1	12.46 %	1	100 %	8		
5	EC-6077-BAD-Pelayanan Publik kepada industri	036-Jasa pelayanan teknis sertifikasi		6	Industri	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	33 %	1	.01 %	0	.01 %	0	33 %	1	.01 %	1	.01 %	1	.01 %	1	.01 %	1	33.91 %	1	100 %	6		
6	EC-6077-BAD-Pelayanan Publik kepada industri	047-Jasa optimisasi pemanfaatan teknologi industri		3	Industri	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.5 %	1	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	1	8.5 %	1	100 %	3
7	EC-6077-BAD-Pelayanan Publik kepada industri	075-Jasa Pelayanan Pemeriksaan dan Peng		13	Industri	7.6 %	1	7.6 %	1	7.6 %	1	7.6 %	1	7.6 %	1	7.6 %	1	7.6 %	1	7.6 %	1	7.6 %	1	7.6 %	1	7.6 %	1	16.4 %	2	100 %	13		

No.	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	PN	Target	Satuan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Jumlah	
						TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO
		ujian Produk Halal																													
8	EC-6077-CAH-Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	021-Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		11	Unit	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	11	100%	11
9	WA-6042-EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informatasi		2	Layanan	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.5%	1	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.5%	1	100%	2
10	WA-6042-EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran		1	Layanan	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.3%	0	8.7%	1	100%	1
11	WA-6042-EBB-Layanan	951-Layanan Sarana		5	Unit	.01%	0	.01%	0	.01%	0	20%	1	.01%	0	20%	1	.01%	0	20%	1	.01%	0	20%	1	.01%	0	19.93%	1	100%	5

No.	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	PN	Target	Satuan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Jumlah			
						TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO
	Sarana dan Prasarana Internal	Internal																															
12	WA-6042-EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan		9	Orang	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	11 %	1	11 %	1	11 %	1	11 %	1	11 %	1	11 %	1	11 %	1	11 %	1	11.97 %	1	100 %	9		
13	WA-6042-EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran		2	Dokumen	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.5 %	1	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.5 %	1	100 %	2
14	WA-6042-EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.3 %	0	8.7 %	1	100 %	1
15	WA-6042-EBD-Layanan Manajemen Keuangan	955-Layanan Manajemen Keuangan		1	Dokumen	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	11 %	0	11 %	0	11 %	0	11 %	0	11 %	0	11 %	0	11 %	0	11 %	0	11.97 %	1	100 %	1		

No.	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	PN	Target	Satuan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Jumlah			
						TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO	TPCRO	TRVRO
	Kinerja Internal																																
16	WA-6042-EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	961-Layanan Reformasi Kinerja		2	Dokumen	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	50 %	1	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	.01 %	0	49.9 %	1	100 %	2

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pencapaian sasaran kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon pada tahun 2024 cukup optimal. Hampir seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditentukan.
2. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan indeks kepuasan pelanggan mencapai indeks 3,82, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indeks 3,6. Hal ini disebabkan oleh performa layanan jasa yang tepat waktu, yaitu sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada pelanggan dan responden yang merasa puas dengan jasa pelayanan yang semakin membaik.
3. Dalam Tahun Anggaran 2025, Penyerapan anggaran Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon pada tahun 2025 adalah sebesar 99,52% persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 9.358.210.000,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sepuluh rupiah). Jumlah penerimaan anggaran PNPB BSPJI Ambon tahun 2025 adalah sebesar Rp1.248.776.737 atau dengan capaian sebesar 250% dari target yang telah ditetapkan yaitu indeks 2

4.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. perencanaan dan penjadwalan kegiatan yang kurang efektif sehingga hasil kegiatan tidak berjalan dengan maksimal
2. Masih terbatasnya industri/perusahaan kecil dan menengah di Maluku, serta minimnya pengetahuan IKM dalam menerapkan sistem mutu bagi produknya.
3. Minimnya anggaran, kenaikan harga, inflasi dan tingginya biaya operasional perkantoran dan laboratorium yang berpotensi menurunkan kinerja organisasi,
4. Keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium,
5. Adanya lembaga pesaing sejenis dengan promosi yang lebih intensif dan layanan jasa yang lebih murah,
6. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, sedangkan SDM berkompeten terancam pindah ke tempat yang lain.

4.3 Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun Anggaran 2024, untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Modul-Modul Pelatihan berbasis kompetensi tentang sistem jaminan mutu dan keamanan pangan untuk membina IKM pengolahan produk berbasis hasil laut.
2. Melakukan kegiatan pembinaan mutu (standarisasi, peningkatan kualitas, perbaikan rasa, metode QC dsb), inovasi perbaikan kemasan, penampilan, labeling dsb), diversifikasi aneka makanan ringan berbasis bahan baku lokal agar lebih diterima konsumen yang luas.
3. Mengupayakan sistem mutu (terutama bagi IKM) yang lebih efisien dan lebih murah
4. Berkolaborasi dengan instansi maupun pihak akademisi untuk peningkatan kemampuan Balai untuk bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri di Maluku.
5. Melakukan promosi dan publikasi kemampuan balai yang lebih intensif melalui media yang ada.
6. Melibatkan masyarakat industri dalam upaya pemecahan masalah, kegiatan inovatif dan peningkatan mutu.
7. Mengupayakan peningkatan sarana laboratorium dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan
8. Penguatan Kompetensi inti Balai melalui Pelatihan Personil untuk mempelajari inovasi produk dan teknologi pengolahan aneka produk hilir hasil laut di negara-negara yang sudah maju dalam hal ini.

LAMPIRAN

FOTO SERTIFIKASI HALAL MAKANAN BERGIZI GRATIS



FOTO KUNJUNGAN KOMISI VII DPR RI



FOTO KEGIATAN PELATIHAN HALAL



